



**ANALISIS KINERJA KOPERASI  
ASPEK PARTISIPASI EKONOMI ANGGOTA  
PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
(KPRI) KABUPATEN REMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Nur Salimah  
NIM 7101407112**

**PERPUSTAKAAN  
UNNES**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2011**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 15 Agustus 2011

Dosen Pembimbing 1

Drs. Bambang Prishardoyo, M.,Si  
NIP.196702071992031001

Dosen Pembimbing II

Prof.Dr. Rusdarti, M.,Si  
NIP.195904211984032001

Mengetahui,

Plt. Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi

Dra. Nanik Suryani,M.,Pd  
NIP.195604211985032001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 9 September 2011



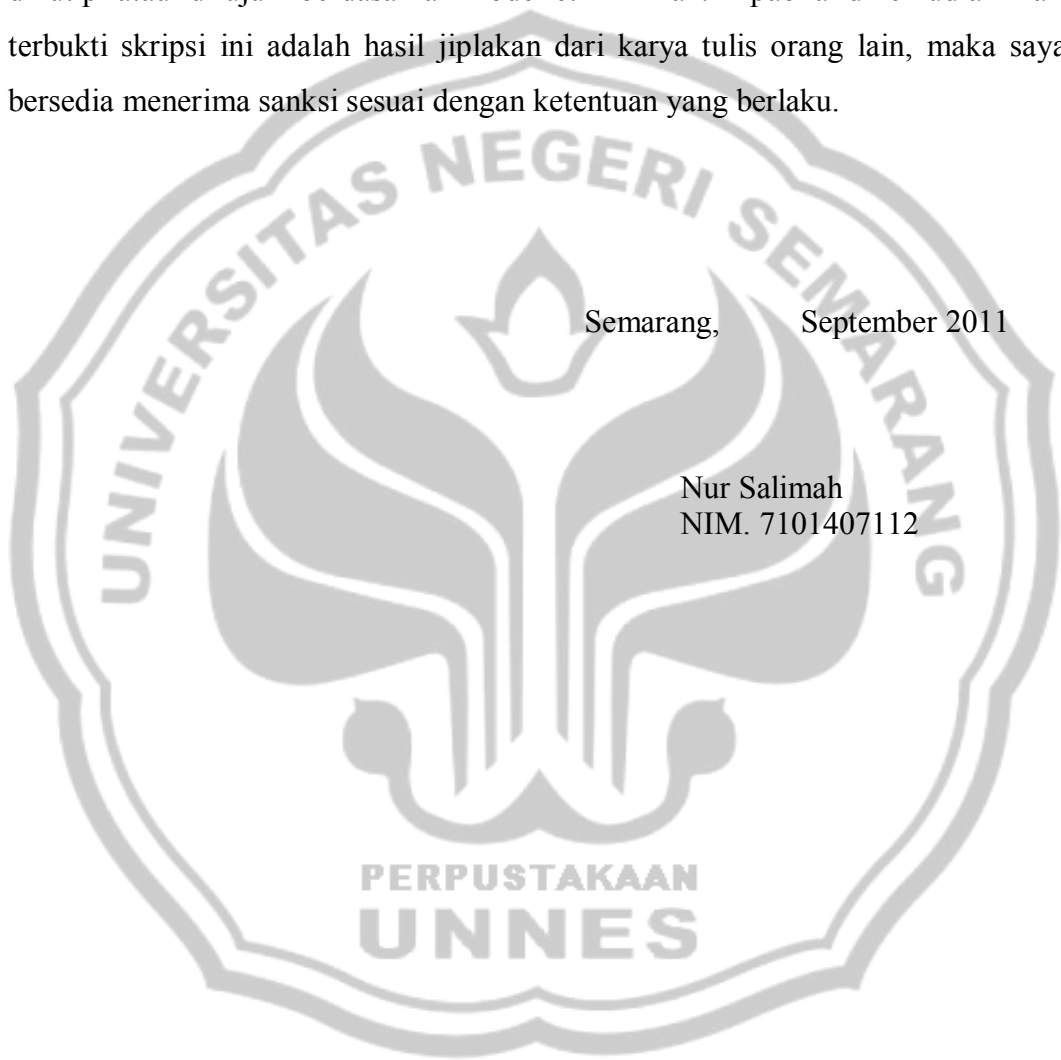
Drs. S. Martono, M.Si  
NIP.196603081989011001

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, September 2011

Nur Salimah  
NIM. 7101407112



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan jalan kami. (Q.S. Al Ankabut: 69)
- ❖ Siapa bersabar dan berhati-hati, maka ia akan mendapat yang dinanti-nanti (Maqolah).
- ❖ Apabila ada niat yang kuat pasti ada seribu jalan, apabila tak ada niat pasti ada seribu alasan.

### PERSEMBAHAN

1. Bapak dan Ibu yang selalu berjuang dan memberikan dukungan serta do'a restu dalam penyusunan skripsi ini (Terima kasih).
2. Penyemangatku (M. Noer Salim)
3. Keluarga besar Ponpes HQ Al Asror.
4. Almamaterku

PERPUSTAKAAN  
UNNES

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang berjudul “Kinerja Koperasi Aspek Partisipasi Ekonomi Anggota pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kabupaten Rembang”. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, tetapi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, kesulitan itu dapat teratasi, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sudjijono Sastroatmojo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang, yang memimpin UNNES sampai sekarang.
2. Drs. S. Martono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah memudahkan dalam administrasi.
3. Dra. Nanik Suryani, M.Pd, Plt. Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah memudahkan dalam administrasi.
4. Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si, dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof.Dr. Rusdarti,M.Si, dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dra. Margunani, M.P., dosen penguji utama yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Bapak Sutoyo, beserta segenap pengurus dan karyawan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di KPRI Kabupaten Rembang.
8. Pengurus KPRI di Kabupaten Rembang yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Kemudian atas bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan, semoga mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan bagi mahasiswa ekonomi pada khususnya.

Semarang, September 2011

Penulis



## SARI

**Salimah, Nur.** 2011. “ *Analisis Kinerja Koperasi Aspek Partisipasi Ekonomi Anggota Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kabupaten Rembang*”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si. II. Prof.Dr. Rusdarti, M.Si.

**Kata kunci: Kinerja Koperasi, Partisipasi Ekonomi Anggota, KPRI Kabupaten Rembang.**

Analisis kinerja koperasi akan memberikan gambaran mengenai kemampuan kinerja koperasi dalam menghasilkan sesuatu, prestasi yang dicapai, dan kemampuan manajemen. Berdasarkan observasi awal pada KPRI Kabupaten Rembang ada beberapa KPRI yang mengukur kinerja hanya pada Rentabilitas, Liquiditas dan Solvabilitas (RLS) dan belum dijumpai KPRI yang menerapkan pengukuran kinerja dengan partisipasi ekonomi anggota. Dengan pengukuran kinerja pada partisipasi ekonomi anggota dapat diketahui apakah koperasi berada diatas rata-rata, pada rata-rata atau dibawah rata-rata. Mengacu dari uraian diatas, maka pokok permasalahan yang diangkat adalah: 1) Bagaimana kinerja KPRI dengan RLS, 2) Bagaimana kinerja KPRI pada partisipasi ekonomi anggota sebagai pemilik (*owner*), 3) Bagaimana kinerja KPRI pada partisipasi ekonomi anggota sebagai pengguna (*user*).

Populasi penelitian ini adalah seluruh KPRI Kabupaten Rembang yang berjumlah 58. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling* didapat sebesar 10 KPRI. Variabel yang diteliti adalah kinerja koperasi dengan Rentabilitas, solvabilitas dan Likuiditas (RLS), kinerja partisipasi ekonomi anggota sebagai pemilik (*owner*), dan kinerja partisipasi ekonomi anggota sebagai pengguna (*user*). Data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif kuantitatif.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kinerja KPRI pada rentabilitas rata-rata 9,89%, likuiditas rata-rata 451,46% dan solvabilitas rata-rata 275,34%. partisipasi ekonomi anggota sebagai pemilik dilihat dari dua indikator yakni pelunasan simpanan pokok berkategori sangat baik dengan rata-rata 99,30%, pelunasan simpanan wajib berkategori sangat baik dengan rata-rata 91,30%. sedangkan partisipasi ekonomi anggota sebagai pengguna dilihat dari transaksi anggota terhadap koperasi berkategori sangat baik dengan rata-rata 95,5% dan penagihan piutang berkategori urang baik dengan rata-rata 208 hari.

Berdasarkan penelitian dapat disarankan kepada KPRI untuk memberikan jangka waktu pengembalian piutang dan pemberian sanksi bagi yang telat membayar, serta melakukan pengukuran kinerja untuk mengevaluasi kinerja KPRI.



# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
SARI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Hakekat Koperasi .....	9
2.2 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) .....	15
2.3 Kinerja Koperasi .....	16
2.4 Analisis Laporan Keuangan.....	28
2.5 Partisipasi Ekonomi Anggota .....	31
2.6 Penelitian Terdahulu .....	41
2.7 Kerangka Berpikir .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi Penelitian .....	45
3.2 Jenis Penelitian .....	45
3.3 Objek Penelitian .....	45

3.4 Populasi.....	45
3.5 Sampel .....	46
3.6 Variabel Penelitian .....	47
3.7 Jenis Data .....	49
3.8 Pengumpulan Data .....	49
3.9 Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian .....	55
4.2 Pembahasan .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
4.1 Simpulan .....	80
4.2 Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN–LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha .....	5
Tabel 1.2 Perkembangan Aktiva Lancar .....	5
Tabel 1.3 Pertumbuhan Piutang.....	6
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	41
Tabel 3.1 Sampel KPRI Kabupaten Rembang .....	46
Tabel 3.2 Penilaian Pelunasan Simpanan Pokok .....	53
Tabel 3.3 Penilaian Pelunasan Simpanan Wajib .....	54
Tabel 4.1 Rentabilitas .....	60
Tabel 4.2 Likuiditas .....	61
Tabel 4.3 Solvabilitas .....	62
Tabel 4.4 Pelunasan Simpanan Pokok .....	63
Tabel 4.5 Pelunasan Simpanan Pokok .....	64
Tabel 4.6 Pelunasan Simpanan Wajib .....	65
Tabel 4.7 Pelunasan Simpanan Wajib .....	66
Tabel 4.8 Transaksi Anggota Terhadap Koperasi .....	67
Tabel 4.9 Transaksi Anggota Terhadap Koperasi .....	68
Tabel 4.10 Penagihan Piutang Anggota .....	69
Tabel 4.11 Penagihan Piutang Anggota.....	70

PERPUSTAKAAN  
UNNES

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian ..... 44



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Sampel KPRI Kabupaten Rembang .....	85
Lampiran 2 Perhitungan Partisipasi Ekonomi Anggota.....	86
Lampiran 3 Perhitungan RLS .....	90
Lampiran 4 Instrumen Penelitian .....	92
Lampiran 5 Laporan Keuangan KPRI Kabupaten Rembang .....	94
Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian .....	131



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha mempunyai peran dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maju dan sejahtera. Diharapkan koperasi membangun diri agar kuat dan mandiri sehingga dapat berperan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Untuk memperlancar peran tersebut, koperasi sebagai badan usaha memerlukan pengukuran kinerja yang tepat sebagai dasar untuk menentukan efektivitas kegiatan usahanya terutama efektivitas operasional, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. (Mulyadi, 2001:416).

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Departemen Koperasi (sekarang Kementerian Koperasi) telah memberikan berbagai konsep pengukuran kinerja koperasi yaitu konsep pengukuran kinerja sebelum tahun 1997 yang meliputi Tiga Sehat (3S) yaitu sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental; pengklasifikasian koperasi setelah tahun 1997 meliputi koperasi A (sangat baik), B (baik), C (kurang baik); penilaian kesehatan USP/KSP (adanya PP No. 9 tahun 1965 dan Kep Men. No. 226 dan 227 tahun 1996); penilaian kesehatan simpan pinjam dan

surat keputusan Menteri Koperasi, pengusaha kecil dan menengah No. 194/KEP/M/IX/1998. Konsep pengukuran kinerja juga dapat diukur melalui produktivitas, efisiensi, kemampuan, pertumbuhan, *cooperative effect* (Keputusan Dep. Kop & PPK RI No. 20/PPK/1997).

Persaingan usaha saat ini sangat kompetitif dan telah menjadi turbulensi dalam ekonomi. Hal ini menuntut perusahaan terus berupaya merumuskan dan menyempurnakan strategi-strategi bisnis guna memenangkan persaingan. Efektivitas penerapan strategi sangat dibutuhkan untuk menentukan kinerja bisnis mereka. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelola operasional, sebagai dasar pendistribusian penghargaan, membantu dalam upaya penentuan dan pengambilan keputusan serta pengidentifikasian berbagai kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pengukuran kinerja merupakan hal yang essential bagi perusahaan ataupun badan usaha, terutama untuk dapat melaksanakan pengelolaan (manajemen) secara efektif dan efisien (Mulyadi dan Setiawan, 2001:22).

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang terdaftar di PKPRI Kabupaten Rembang berjumlah 58 buah, yang berkedudukan di instansi pemerintahan yaitu kantor dinas, instansi, lembaga, badan dan sekolah yang tersebar luas di Kabupaten Rembang. Kegiatan mayoritas adalah simpan pinjam, selain itu ada yang mengelola usaha warung serba ada (waserda), pengadaan barang, persewaan gedung, ATK dan fotocopy.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh fakta bahwa pengukuran kinerja pada beberapa koperasi yang selama ini

diterapkan pada penilaian kinerja keuangan, penilaian laporan dengan analisis Rentabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas (RLS).

Pengukuran kinerja dengan menggunakan laporan keuangan yang diterapkan di KPRI se-Kabupaten Rembang selama ini mempunyai beberapa kelemahan diantaranya, (1) ketidakmampuan untuk mengukur kinerja pada harta yang tak tampak (*intangible asset*) dan harta intelektual (*intellectual property*) misalnya sumber daya manusia, (2) kinerja pada sisi laporan keuangan hanya mampu memberikan gambaran mengenai masa lalu organisasi bisnis (koperasi), tidak mampu menjelaskan arah perkembangan koperasi, dan hanya mampu berorientasi pada jangka pendek.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengukuran kinerja tersebut mengakibatkan perlunya pengukuran kinerja yang menyeluruh, yaitu pengukuran kinerja yang tidak hanya mengukur kinerja keuangan saja, akan tetapi juga mampu menggambarkan kondisi koperasi secara lengkap, jelas, akurat, terutama pada sumber daya manusia yang diintegrasikan dalam perencanaan baik organisasi maupun usaha. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh koperasi itu sendiri dimaksudkan untuk menilai apakah usaha yang dikelola dapat menjadikan koperasi untuk tumbuh dan berkembang sehingga dapat memajukan kesejahteraan anggota dan memberdayakan perekonomian. Sebagaimana usaha yang dikelola oleh KPRI di Kabupaten Rembang juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya serta turut andil dalam meningkatkan tatanan perekonomian nasional. Usaha yang dikelola oleh KPRI beragam meliputi usaha simpan pinjam, warung serba ada (*waserda*), pengadaan barang, persewaan gedung, ATK dan fotocopy.



Dengan adanya berbagai usaha yang dikelola oleh koperasi maka pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai usaha yang dikelola dan dapat menumbuh kembangkan koperasi sehingga tujuan yang ditetapkan dapat terwujud.

Partisipasi merupakan peran serta anggota dalam mengawasi jalannya usaha, permodalan dan menikmati keuntungan usaha serta keterlibatan anggota dalam mengevaluasi hasil-hasil koperasi. Sedangkan Partisipasi ekonomi anggota merupakan keterlibatan anggota dalam kegiatan ekonomi koperasi dan pemupukan modal. Partisipasi ekonomi anggota merupakan salah satu hal vital dalam perjalanan koperasi, karena tanpa adanya partisipasi anggota, maka koperasi tidak bisa hidup dan tujuan utamanya belum bisa dikatakan tercapai. partisipasi dapat dijadikan tolok ukur mengingat pentingnya partisipasi dalam koperasi. Penilaian kinerja dapat digunakan untuk diketahui keadaan koperasi selama ini.

Pengukuran kinerja dengan rasio-rasio keuangan ini belum cukup mampu menunjukkan kemampuan rata-rata KPRI untuk maju sehingga pencapaian kesejahteraan anggota dan kemajuan tatanan perekonomian masih rendah. Kinerja koperasi dapat dilihat pada akun Sisa Hasil Usaha (SHU), aktiva lancar dan piutang dibawah ini:

**Tabel 1.1 Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha**

No	Nama KPRI	SHU		% kenaikan / penurunan
		2009	2010	
1.	Usaha Sejahtera	Rp 1.134.399.052	Rp 1.296.628.864	19,30%
2.	Makmur	Rp 25.846.573	Rp 34.006.742	31,57%
3.	Hemat	Rp 126.629.062	Rp 123.655.573	(2,35%)
4.	Khoiro Ummah	Rp 49.247.596,80	Rp 75.414.841,78	53,13%

Sumber: Laporan keuangan KPRI Kabupaten Rembang

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat kinerja sebagian dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia dari besaran SHU mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari KPRI Khoiro Ummah dimana terjadi kenaikan sebesar 53,13 % atau Rp 26.167.244,98 dari SHU tahun 2009 sebesar Rp 49.247.596,80 menjadi Rp 75.414.841,78 pada tahun 2010. Bahkan ada yang mengalami penurunan, hal ini terjadi pada KPRI Hemat dimana terjadi penurunan sebesar 2,35 % atau Rp 2.973.489 dari SHU tahun 2009 sebesar Rp 126.629.062 menjadi Rp 123.655.573 pada tahun 2010.

**Tabel 1.2 Perkembangan Aktiva Lancar**

No	Nama KPRI	Aktiva Lancar		% kenaikan / penurunan
		2009	2010	
1.	Usaha Sejahtera	Rp 1.044.096.171	Rp 1.195.918.033	14,54%
2.	Makmur	Rp 250.066.602	Rp 277.721.756	11,06%
3.	Hemat	Rp 2.286.987.244	Rp 2.754.116.824	20,43%
4.	Khoiro Ummah	Rp 238.131.841,87	Rp 379.848.962,16	59,51%

Sumber: Laporan Keuangan KPRI Kabupaten Rembang

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat kinerja sebagian dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia dari besaran aktiva lancar mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari KPRI Khoiro Ummah dimana terjadi kenaikan sebesar 59,51 % atau Rp 141.717.120,3 dari aktiva lancar tahun 2009 sebesar Rp238.131.841,87 menjadi Rp379.848.962,16 pada tahun 2010.

**Tabel 1.3 Pertumbuhan Piutang Anggota**

No	Nama KPRI	Piutang Anggota		% kenaikan / penurunan
		2009	2010	
1.	Usaha Sejahtera	Rp 862.602.500	Rp 965.243.700	11,90 %
2.	Makmur	Rp 246.321.900	Rp 247.135.300	0,33 %
3.	Hemat	Rp 2.217.401.965	Rp 2.586.630.005	16,65 %
4.	Khoiro Ummah	Rp 305.763.602,53	Rp 196.724.678,69	(35,66 %)

Sumber: Laporan Keuangan KPRI Kabupaten Rembang

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat kinerja sebagian dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia dari piutang anggota mengalami peningkatan yang besar. Hal ini bisa dilihat dari KPRI Hemat dimana terjadi kenaikan sebesar 16,65 % atau Rp369.228.040 dari piutang anggota tahun 2009 sebesar Rp2.217.401.965 menjadi Rp2.586.630.005 pada tahun 2010. Bahkan ada yang mengalami penurunan, hal ini terjadi pada KPRI Khoiro Ummah dimana terjadi penurunan sebesar 35,66 % atau sebesar Rp109.038.923,9 dari tahun 2009 sebesar Rp305.763.602,53 menjadi Rp196.724.678,69 pada tahun 2010.

Dari Tabel 1.1 dan 1.3 dapat dilihat, meskipun koperasi mengalami penurunan dalam hal SHU pada KPRI Hemat dan penurunan piutang usaha pada KPRI Khoiro Ummah kedua KPRI tersebut sampai sekarang masih menjalankan usahanya. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja koperasi pada aspek partisipasi ekonomi anggota untuk mengetahui koperasi berada di atas rata-rata, pada rata-rata atau di bawah rata-rata kinerjanya selama ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengukuran kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dengan rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas?
2. Bagaimana pengukuran kinerja pada aspek partisipasi ekonomi anggota sebagai pemilik (*owner*)?
3. Bagaimana pengukuran kinerja pada aspek partisipasi ekonomi anggota sebagai pengguna (*user*)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dilihat berikut ini:

4. Mengetahui pengukuran kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dengan rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas.
5. Mengetahui pengukuran kinerja pada aspek partisipasi ekonomi anggota sebagai pemilik (*owner*).
6. Mengetahui pengukuran kinerja pada aspek partisipasi ekonomi anggota sebagai pengguna (*user*).

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi KPRI

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai masukan KPRI untuk meningkatkan kinerja koperasi baik dari aspek partisipasi ekonomi anggota

2. Bagi dunia pendidikan

Diharapkan bisa berguna bagi almamater, sebagai bahan acuan sumber bacaan dan khasanah perpustakaan



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Hakekat Koperasi**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari kata *cooperation* yang artinya kerjasama. Koperasi juga bisa diartikan sebagai badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya ekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Koperasi menurut Undang-Undang Koperasi Tahun 1967 No. 12 tentang pokok - pokok perkoperasian adalah sebagai berikut:

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Perkoperasian di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Jadi koperasi itu merupakan bentuk kerjasama orang-seorang atau badan yang mempunyai persamaan kepentingan, dan bukan kumpulan modal yang

bertujuan memajukan kesejahteraan material anggotanya dengan memberi pelayanan kepada anggota seadil-adilnya. Pengelolaan koperasi dilakukan secara terbuka yang senantiasa mengalami koordinasi antara koperasi satu dengan koperasi lainnya. Jadi tidak ada persaingan dalam koperasi. Koperasi tidak sama dengan badan hukum lainnya semacam Perseroan Terbatas, Firma, CV atau juga dengan perusahaan perseorangan. Untuk itu Tunggal (1995: 3-4), telah menentukan ciri-ciri dari koperasi sebagai berikut:

1. Perkumpulan orang.
2. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi.
3. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
4. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota.
5. Tidak mementingkan pemasukan modal atau pekerjaan usaha tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan.
6. Dalam rapat anggota, tiap anggota masing-masing satu suara (*one vote one member*) tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing.
7. Setiap anggota bebas untuk masuk atau keluar (anggota berganti) sehingga dalam koperasi tidak ada modal permanen.
8. Seperti halnya perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka koperasi mempunyai badan hukum.
9. Menjalankan suatu usaha.
10. Penanggungjawab koperasi adalah pengurus.

11. Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya.
12. Koperasi adalah usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong-royongan. Setiap anggota berkewajiban bekerjasama untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan para anggota.
13. Kerugian dipikul bersama antar anggota. Jika koperasi menderita kerugian, maka para anggota memikul bersama. Anggota yang tidak mampu dibebaskan atas beban/ tanggungan kerugian. Kerugian dipikul oleh anggota yang mampu.

### **2.1.2 Prinsip-Prinsip Koperasi**

Sendi-sendi dasar koperasi pertama kali besumber dari apa yang ditemukan oleh Rochdale dan selanjutnya dikenal dengan “prinsi-prinsip Rochdale” pada tahun 1844. Prinsip-prinsip itu ternyata sudah dijadikan landasan koperasi di seluruh dunia, hanya saja pengambilannya tidak sepenuhnya tapi yang sesuai dengan aturan dan kebudayaan di negara tersebut. Prinsip-prinsip itu menerangkan cara kerja koperasi yang berbeda dengan cara kerja badan usaha lainnya.

Dr. Fauguet dalam bukunya *The Cooperative Sector* 1951, menegaskan adanya empat prinsip yang setidaknya harus dipenuhi oleh setiap badan yang mengatas namakan sebagai koperasi, prinsip-prinsip itu adalah:

1. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang didalam hasil yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh setiap pemakai dalam koperasi.
2. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota.



3. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarela.
4. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota dalam ketatalaksanaan usaha koperasi.

Pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 pasal 5 ayat 1 dan 2 merinci prinsip koperasi yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha anggota
4. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal
5. Mandiri, tidak tergantung pada pihak lain
6. Pendidikan perkoperasian untuk mewujudkan tujuan koperasi.
7. Kerjasama antar koperasi.

Selain itu dalam gerak langkahnya, koperasi harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini mempunyai maksud kemakmuran bukanlah untuk orang-seorang melainkan untuk semua masyarakat. Selain itu koperasi merupakan unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi dan moral.

Berdasarkan kongres ICA tahun 1995 di Manchester, Inggris tahun 1995, yang berhasil merumuskan pernyataan tentang jati diri koperasi (Identity Cooperative ICA Statement/ICIS), yang butir-butirnya adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka;
2. Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis;
3. Partisipasi Ekonomi Anggota;
4. Otonomi dan Kebebasan;
5. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi;
6. Kerja sama di antara Koperasi-Koperasi;
7. Kepedulian Terhadap Komunitas.

Sedangkan peranan koperasi dalam kehidupan suatu perekonomian oleh Tunggal (1995:5) dirinci sebagai berikut:

1. Membantu anggota untuk peningkatan pendapatan/ penghasilan.
2. Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan.
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang, baik perseorangan maupun warga masyarakat.
6. Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.

Peranan koperasi yang telah dirinci tersebut merupakan suatu cita-cita yang luhur dan pantas untuk dilaksanakan terutama untuk membangun perekonomian Indonesia yang terpuruk. Dengan adanya koperasi yang kokoh maka banyak kemanfaatan yang diperoleh disana, seperti menyediakan lapangan pekerjaan, membantu penambahan pendapatan keluarga, menimbulkan rasa kebersamaan diantara anggota. Jadi dapat disimpulkan koperasi merupakan alat untuk mempererat persatuan, dan tentu keberadaan koperasi telah turut andil

dalam pembangunan perekonomian Indonesia dan membantu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 menyatakan beberapa fungsi koperasi diantaranya.

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Mengenai bentuk koperasi pada umumnya dibagi menjadi antara lain :

1. Koperasi Primer yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orangan.
2. Koperasi Sekunder yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi

Dalam penelitian ini, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) termasuk jenis koperasi primer karena anggotanya adalah orang-orangan, yakni para pegawai negeri. Sebuah organisasi koperasi mempunyai perangkat yang terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Pengelola dalam sebuah

koperasi merupakan pemegang kuasa dari pengurus koperasi yang diberi wewenang untuk mengelola usaha dan merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan, sedangkan tanggung jawab pengurus mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota tidak menjadi berkurang. Pengurus dan pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.

## **2.2 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)**

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah koperasi fungsional yang bergerak di bidang konsumsi yang anggotanya para pegawai negeri (PNS) (Chaniago, 1984: 38).

Dilihat dari lapangan usahanya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah koperasi golongan konsumen yang berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya dalam meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dilihat dari jenisnya, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) termasuk jenis golongan koperasi fungsional dimana anggotanya mempunyai kesamaan profesi dan kepentingan yaitu sebagai pegawai negeri.

Menurut Koerman (2004: 88) jajaran Koperasi Pegawai Negeri (sekarang KPRI) antara lain:

1. Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (sekarang IKPRI) berkedudukan di ibu kota negara. Anggotanya adalah Gabungan Koperasi Pegawai Negeri (sekarang GKPRI).

2. Gabungan Koperasi Pegawai Negeri (sekarang GKPRI) berkedudukan di ibu kota provinsi. Anggotanya adalah PKPN (sekarang PKPRI) yang berada di ibu kota atau kabupaten.
3. Pusat Koperasi Pegawai Negeri (sekarang PKPRI) yang berkedudukan di ibu kota atau kabupaten, anggotanya adalah Koperasi Pegawai Negeri (sekarang KPRI)
4. Koperasi Pegawai Negeri (sekarang KPRI) anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai wilayah kerja kecamatan atau berada dalam lembaga pemerintah atau sekolah-sekolah atau kecamatan-kecamatan.

Menurut Koerman (2003: 91-92) KPRI merupakan wadah fungsional sebagai alat pimpinan untuk meningkatkan kesejahteraan anak buahnya dan sebagai wahana, sarana perjuangan bagi anggotanya untuk menolong diri sendiri melalui kerjasama dalam koperasi.

## **2.3 Kinerja koperasi**

### **2.3.1 Pengertian kinerja**

Kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Berdasarkan S.K Menteri Keuangan RI No. 740/KMK.00/1989, kinerja adalah prestasi yang dicapai dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan. Kinerja menjadi ukuran prestasi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, istilah kinerja perusahaan kerap kali disamakan dengan kondisi keuangan perusahaan yang dengan pengukuran

keuangan mampu memberikan hasil yang memuaskan setidaknya-tidaknya bagi pemilik saham perusahaan itu maupun bagi karyawannya. (Munawir, 2002:73).

Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Hawkins (The Oxford Paperback Dictionary, 1979) mengemukakan pengertian kinerja sebagai berikut: “*Performance is: (1) the process or manner of performing, (2) a notable action or achievement, (3) the performing of a play or other entertainment*”.

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. Untuk mengetahui kinerja yang dicapai maka dilakukan penilaian kinerja.

### **2.3.2 Pengertian penilaian kinerja**

Kata penilaian sering diartikan dengan kata *assessment*. Sedangkan kinerja merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar atau pedoman yang ditetapkan. Dengan demikian penilaian kinerja perusahaan (*Companies performance assessment*) mengandung makna suatu proses atau sistem penilaian mengenai pelaksanaan kemampuan kerja suatu perusahaan (organisasi) berdasarkan standar tertentu (Kaplan dan Norton, 1996; Lingle dan Schiemann, 1996; Brandon & Drtina, 1997).

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personil mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan

sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam rencana strategik, program dan anggaran organisasi. Penilaian kinerja juga digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang ataupun menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.

Sistem penilaian kinerja yang efektif sebaiknya mengandung indikator kinerja, yaitu: (1) memperhatikan setiap aktivitas organisasi dan menekankan pada perspektif pelanggan, (2) menilai setiap aktivitas dengan menggunakan alat ukur kinerja yang mengesahkan pelanggan, (3) memperhatikan semua aspek aktivitas kinerja secara komprehensif yang mempengaruhi pelanggan, dan (4) menyediakan informasi berupa umpan balik untuk membantu anggota organisasi mengenali permasalahan dan peluang untuk melakukan perbaikan.

Lebih jauh Atkinson, Banker, Kaplan dan Young (1995) mengatakan bahwa *the role of performance assessment in helping organization members to manage the value chain*. Merujuk pada konsep tersebut, maka penilaian kinerja mengandung tugas-tugas untuk mengukur berbagai aktivitas tingkat organisasi sehingga menghasilkan informasi umpan balik untuk melakukan perbaikan organisasi. Perbaikan organisasi mengandung makna perbaikan manajemen organisasi yang meliputi: (a) perbaikan perencanaan, (b) perbaikan proses, dan (c) perbaikan evaluasi. Hasil evaluasi selanjutnya merupakan informasi untuk perbaikan “perencanaan-proses-evaluasi” selanjutnya. Proses “perencanaan

proses- evaluasi” harus dilakukan secara terus-menerus (*continuous process improvement*) agar faktor strategik (keunggulan bersaing) dapat tercapai.

### 2.3.3 Tujuan dan manfaat pengukuran kinerja

Tujuan pokok dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam usaha untuk mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil seperti yang diinginkan (Mulyadi, 2001:416). Standar perilaku tersebut bisa berupa kebijakan manajemen ataupun rencana formal yang nantinya dituangkan dalam anggaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Penilaian kinerja tersebut dilakukan untuk menilai perilaku yang tidak semestinya dilakukan dan untuk merangsang timbulnya perilaku yang semestinya dilakukan.

Rangsangan timbulnya perilaku yang semestinya dapat dilakukan dengan memberikan *reward* atas hasil kinerja yang baik. Penilaian kinerja dapat dilaksanakan oleh pihak manajemen perusahaan sendiri (intern) atau pihak luar (ekstern). Sistem pengukuran kinerja mempunyai peranan penting dalam fungsi-fungsi manajemen organisasi seperti pengendalian manajemen, manajemen aktivitas, dan sistem motivasi (Atkinson Antony A, 1995:235). Sistem pengukuran kinerja berperan pula dalam usaha-usaha pencapaian keselarasan tujuan (*goal congruence*) dalam konteks wewenang dan tanggung jawab.

Pengembangan lebih lanjut dalam manajemen berbasis aktivitas, pengukuran kinerja dirancang untuk mengurangi kegiatan yang tidak mempunyai nilai tambah dan mengoptimalkan kegiatan yang mempunyai nilai tambah. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting untuk menilai



keberhasilan perusahaan, penilaian kinerja juga sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan, misalnya penentuan tingkat gaji karyawan maupun *reward* yang layak. Seorang manajer juga bisa menggunakan penilaian kinerja perusahaan sebagai evaluasi kerja dari periode yang lalu (Hansen & Mowen, 1995:386-387).

Menurut Mulyadi (2001:416), Manfaat pengukuran kinerja yaitu : (1) Mengelola organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum, (2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian, (3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan criteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan, (4) Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka, dan (5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan tujuan dan manfaat penilaian kinerja yaitu:

1. Untuk memotivasi karyawan suatu organisasi agar menghasilkan tindakan yang diinginkan.
2. Untuk merangsang perilaku atau tindakan yang lebih baik.
3. Untuk mengendalikan sistem manajemen suatu organisasi.
4. Untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang bersangkutan dengan karyawan.
5. Untuk mengevaluasi hasil kerja periode yang lalu.

### 2.3.4 Proses pengukuran kinerja

Proses pengukuran kinerja dilaksanakan dalam dua tahap utama, yaitu tahap persiapan dan tahap penilaian (Mulyadi, 2001: 418),

1. Tahap persiapan terdiri dari tiga tahap rinci, yaitu :

a. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab.

Perbaikan kinerja harus diawali dengan penetapan garis batas tanggung jawab yang jelas bagi manajer yang akan dinilai kinerjanya. Batas tanggung jawab yang jelas ini dipakai sebagai dasar untuk menetapkan sasaran atau standar yang harus dicapai oleh manajer yang akan diukur kinerjanya. Tiga hal yang berkaitan dengan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab, yaitu kriteria penetapan tanggung jawab, tipe pusa pertanggungjawaban, karakteristik pusat pertanggungjawaban.

b. Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja

Penetapan kriteria kinerja manajer perlu dipertimbangkan beberapa faktor antara lain.

- 1) Dapat diukur atau tidaknya kriteria,
- 2) Rentang waktu sumber daya dan biaya,
- 3) Bobot yang diperhitungkan atas kriteria,
- 4) Tipe kriteria yang digunakan dan aspek yang ditimbulkan.

c. Pengukuran kinerja

Langkah berikutnya dalam pengukuran kinerja adalah melakukan kinerja bagian atas aktivitas sesungguhnya, yang menjadi daerah wewenang

manajer tersebut. Pengukuran kinerja tampak obyektif dan merupakan kegiatan yang rutin, namun seringkali memicu timbulnya perilaku yang tidak semestinya ataupun menyimpang yaitu perataan (*smoothing*), pencondongan (*biasing*), permainan (*gaming*), penonjolan dan pelanggaran aturan (*focusing and illegal act*).

2. Tahap Penilaian terdiri dari tiga tahap rinci (Mulyadi, 2001:424)
  - a. Perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, penilaian kinerja tersebut dijelaskan, hasil pengukuran kinerja secara periodik kemudian dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
  - b. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar. Penyimpangan kinerja sesungguhnya dari sasaran yang telah ditetapkan perlu dianalisis untuk menentukan penyebab terjadinya penyimpangan, sehingga dapat direncanakan tindakan untuk mengatasinya.
  - c. Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan.
3. Tahap terakhir dalam pengukuran kinerja adalah tindakan koreksi untuk menegakkan perilaku yang diinginkan dan mencegah terulangnya tindakan/perilaku yang tidak diinginkan. Penilaian kinerja ditujukan untuk menegakkan perilaku tertentu dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

### 2.3.5 Pengukuran kinerja konvensional

Manajemen konvensional melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan ukuran keuangan, yaitu hasil laporan keuangan yang diwujudkan dalam rasio keuangan antara lain likuiditas, solvabilitas, produktivitas, dan ukuran yang lainnya (Ikhsan, 2005:8). Ukuran keuangan inilah yang dengan mudah dilakukan pengukurannya, maka kinerja personil yang diukur adalah hanya yang berkaitan dengan keuangan. Hal yang sulit diukur, diabaikan atau diberi nilai kuantitatif secara sembarang. Pengukuran kinerja konvensional dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan dengan biaya standar sesuai dengan biaya dan karakteristik pusat pertanggungjawabannya. Pengukuran kinerja konvensional ini, yang diukur dari :

#### 1. Ukuran Kinerja berdasar pada Laporan Keuangan

Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangat perlu untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas (SAK No.1, 2002: 5).

Analisa terhadap pos-pos neraca akan mengetahui gambaran tentang posisi keuangannya, sedangkan analisa terhadap laporan laba ruginya akan memberikan gambaran tentang hasil atau perkembangan usaha perusahaan yang bersangkutan (Munawir, 2002:1). Manajemen konvensional ukuran kinerja yang biasa digunakan adalah ukuran keuangan, karena ukuran

keuangan inilah yang dengan mudah dilakukan pengukurannya (Mulyadi dan Setiawan, 2001). Ukuran keuangan yang biasa digunakan adalah rasio-rasio keuangan meliputi (Munawir 2002):

- a. Rasio *Likuiditas*, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya bila jatuh tempo. Rasio ini merupakan rasio aktiva lancar terhadap hutang lancar.
- b. Rasio *Leverage*, yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang.
- c. Rasio *Aktivitas*, yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya.
- d. Rasio *Profitabilitas*, yang mengukur efektivitas manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi perusahaan.
- e. Rasio *Pertumbuhan*, yang mengukur kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya didalam pertumbuhan ekonomi dan industri
- f. Rasio *Penilaian*, yang mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai dasar yang melampaui pengeluaran biaya industri.

Menurut Kaplan dan Norton (1996), pengukuran kinerja dengan menggunakan rasio-rasio seperti di atas mempunyai kelemahan yaitu :

- 1) Ketidakmampuan mengukur kinerja harta-harta tak nampak (*intangible asset*) dan harta-harta intelektual (SDM) perusahaan.

- 2) Kinerja keuangan hanya mampu bercerita sedikit masa lalu perusahaan dan tak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah yang lebih baik.

## 2. Ukuran Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Anggaran dan Realisasinya Sebagai suatu badan usaha maka koperasi dengan sendirinya harus pula memiliki tujuan dan prinsip ekonomi pada dirinya. Selain itu, sebagai suatu perubahan maka pendirian dan operasinya koperasi harus menyediakan dan sebagai modal, baik untuk investasi maupun modal kerja atau modal usahanya. Dalam kaitan ini perlu disusun rencana pengeluaran atau anggaran pengeluaran, antara lain :

- 1) Anggaran pendirian koperasi, seperti untuk biaya penyelenggaraan rapat, biaya transportasi, biaya penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran, dan lain-lain. Dalam pendirian perkumpulan koperasi dibutuhkan dana yang relatif tidak terlalu besar dibanding anggaran operasional.
- 2) Anggaran operasional, seperti biaya pembuatan surat-surat izin, termasuk penyelesaian badan hukum koperasi seta SIUP (Surat Izin Perdagangan) dari Departemen Perdagangan. Selain itu tentu saja untuk modal kerja dan investasi. Setelah perkumpulan koperasi dibentuk maka selanjutnya dibutuhkan dana guna melaksanakan misinya dan tujuan yang ditetapkan oleh rapat anggota. Untuk ini perlu disusun rencana kerja dan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi baik oleh Pengurus maupun oleh Manajer (Sudarsono & Edilius, 2004:32).

### b. Produktivitas

Menurut Sindang P Siagian yang dimaksud dengan produktivitas adalah kemampuan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang optimal, bahkan mungkin maksimal. Ukuran kinerja koperasi bertolak dari proses produktivitasnya dilihat dari sejauh mana koperasi mampu memperoleh laba dari dana yang telah ditanamkan oleh koperasi selama ini.

Menurut pengukuran kinerja koperasi sesuai dengan pedoman pembinaan koperasi Dep.Kop & PPK RI No. 20/PPK/1997, pengukuran produktivitas menggunakan :

- 1) *Asset Turn Over* (perputaran kekayaan), yaitu perbandingan rasio penjualan bersih terhadap total asset.
- 2) *Profit Margin* yaitu perbandingan rasio SHU terhadap total penjualan.
- 3) *Net Earning Power (ROI)* yaitu perbandingan antara rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset.
- 4) Rentabilitas Modal Sendiri (*ROE*) yaitu perbandingan antara rasio SHU bersih terhadap modal sendiri.

### 3. Efektivitas

Efektivitas koperasi merupakan tingkat keberhasilan koperasi dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan (Modul Kep Men.Kop & UKM, 2004:48), sehingga dalam penelitian ini ukuran kinerja yang bertolak dari efektivitas koperasi adalah sejauh mana koperasi mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anggota-anggotanya

(dan masyarakat di sekelilingnya) dengan baik, seperti pengembalian jasa yang menjadi hak anggota, pengamanan dana-dana yang berasal dari anggota, pelayanan usaha yang baik agar anggota terpuaskan.

#### 4. *Balance Score Card* (BSC)

Kaplan dan Norton (2000:16) menyatakan *Balance Score Card* adalah suatu kerangka kerja untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan. *Balance Score Card* merupakan suatu sistem manajemen, pengukuran, dan pengendalian secara cepat, tepat dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang kinerja bisnis.

Fokus pengukuran *Balance Score Card* untuk melaksanakan proses manajemen kritis (Kaplan dan Norton, 2000:16)

1. Mengklarifikasi dan menterjemahkan visi dan strategi.
2. Mengkomunikasikan dan menghubungkan strategi obyektif dan ukuran hasil.
3. Merencanakan, menetapkan target dan merumuskan strategi inisiatif.
4. Meningkatkan strategi umpan balik dan pembelajaran strategi (menelaah kembali keseluruhan proses untuk melihat adanya kekurangan dan melakukan perbaikan).

## 2.4 Analisis Laporan Keuangan

Dalam PSAK Nomor 27 dinyatakan bahwa laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi. Laporan keuangan



koperasi lebih ditujukan kepada pihak-pihak di luar pengurus koperasi dan tidak dimaksudkan untuk pengendalian usaha (Ikatan Akuntan Indonesia: 2002). Selanjutnya berdasarkan laporan keuangan koperasi tersebut, para pemakai dapat melakukan penilaian terhadap kinerja koperasi.

Kepentingan pemakai utama laporan keuangan koperasi terutama adalah untuk: a) Menilai pertanggungjawaban pengurus b). Menilai prestasi pengurus c) Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya d) Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya dan jasa yang diberikan kepada koperasi (Ikatan Akuntan Indonesia: 2002). Oleh karena itu begitu penting untuk selalu dilakukan analisis terhadap laporan keuangan koperasi agar segera terdeteksi jika terjadi ketidakberesan masalah keuangan di koperasi.

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil usaha yang telah dicapai oleh koperasi. Data keuangan akan bermakna jika dilakukan analisis, sehingga dapat segera digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Laporan keuangan adalah suatu alat bantu yang dapat digunakan untuk membuat suatu keputusan antara lain mengenai rencana-rencanan perusahaan, penanaman modal/investasi, pencarian sumber-sumber dana oprasi perusahaan lainnya (Amin Wijaya Tunggal: 1995: 22). Melalui analisis laporan keuangan ini maka para pemakai informasi akuntansi dapat mengambil keputusan. Pengelola/manajer koperasi dapat menilai apakah kinerjanya dalam suatu periode yang lalu mendatangkan keuntungan atau tidak.

### 2.4.1 Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah suatu hal yang menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain atau perbandingan antara berbagai gejala yang dinyatakan dengan angka/persentase. (Amin Wijaya Tunggal: 1995). Beberapa jenis analisis rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja *financial* antara lain :

#### 1. Analisis Rasio Rentabilitas

Menurut Munawir (2001:33), rentabilitas adalah kemampuan koperasi untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu koperasi diukur dengan kesuksesan koperasi dan kemampuan menggunakan aktiva yang produktif, dengan demikian rentabilitas operasi dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan aktiva atau jumlah modal koperasi.

Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dan dinyatakan dengan persentase (Riyanto, 2001: 35). Dalam perhitungannya rentabilitas modal sendiri hal ini yang harus dicari dalam besarnya untung bersih dan jumlah modal sendiri. Pada umumnya rentabilitas dapat dirumuskan :

$$\text{Rentabilitas} = \frac{\text{aktiva lancar}}{\text{utang lancar}} \times 100\%$$

(Riyanto, 2001:            utang lancar

Rasio Rentabilitas Modal Sendiri yang tinggi menunjukkan keberhasilan koperasi dalam memperoleh penghasilan yang nantinya akan diberikan untuk kesejahteraan anggota koperasi.

## 2. Analisa Rasio Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dipenuhi (Riyanto, 1995: 25) sejalan dengan pendapat Munawir (1995: 31) likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan saat ditagih. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Pada umumnya likuiditas dapat dirumuskan:

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{aktiva lancar}}{\text{utang lancar}} \times 100\%$$

(Riyanto, 2001: 38)

## 3. Analisis Rasio Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan atau badan usaha untuk membayar kewajibannya apabila perusahaan tersebut harus dilikuidasikan (Riyanto, 2001: 25). Menurut Munawir (1995: 32) solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya analisis rasio solvabilitas dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh dari proses menganalisis rasio yang berhubungan

dengan pelunasan kewajiban serta pengembalian modal. Pada umumnya solvabilitas dapat dirumuskan:

$$\text{Solvabilitas} = \frac{\text{Total aktiva}}{\text{Total kewajiban}} \times 100\%$$

(Riyanto, 2001: 38)

## 2.5 Partisipasi Anggota

Permasalahan yang sering dialami oleh koperasi di Indonesia yaitu pertumbuhan yang tidak diimbangi dengan kualitas yang baik sehingga banyak koperasi yang tidak bisa bertahan karena perubahan yang terjadi di perekonomian sekarang ini. Salah satu kendala disebabkan rendahnya kesadaran anggota dalam berpartisipasi pada koperasi. Padahal partisipasi anggota sangat penting demi kemajuan koperasi, sesuai dengan pendapat Ropke (2003: 39) yang menyatakan bahwa: “Tanpa partisipasi anggota, kemungkinan atas rendah atau menurunnya efisiensi dan efektivitas anggota dalam rangka mencapai kinerja koperasi akan lebih besar”.

Partisipasi berarti turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan, peran serta, turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi seseorang orang yang bersangkutan melaksanakan tanggungjawabnya melakukan hal tersebut (KBHI : 2003).

Partisipasi anggota adalah proses atau kegiatan dimana para anggota bekerjasama atau berusaha bersama melalui koperasinya, antara lain menghadiri

rapat anggota, mengikuti pendidikan dan penyuluhan koperasi, melakukan transaksi usaha dengan koperasi dan ikut bertanggungjawab terhadap perkembangan koperasi (Majlis Koperasi Indonesia 1990: 36 dalam Nailul Fitri). Partisipasi merupakan peran serta anggota dalam mengawasi jalannya usaha, permodalan, dan menikmati keuntungan usaha serta keterlibatannya anggota dalam mengevaluasi hasil-hasil kegiatan koperasi.

Koperasi akan berfungsi dengan baik dan berhasil jika mengikutsertakan partisipasi anggota. tanpa adanya partisipasi anggota mustahil koperasi koperasi dapat berjalan dengan baik. hal ini sesuai dengan pendapat anoraga (1992:111). partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan koperasi sehingga peran anggota sangat penting. Anggota punya wewenang mengendalikan koperasi yaitu sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa. Partisipasi anggota dapat pula berupa modal koperasi.

Partisipasi anggota sangat penting bagi suatu koperasi untuk menentukan arah kegiatan atau usaha dalam memanfaatkan usaha-usaha pelayanan organisasinya. partisipasi anggota koperasi menurut statusnya dirinci menjadi:

1. Partisipasi anggota dalam RAT
2. Partisipasi anggota dalam penanaman modal dengan simpanan-simpanan
3. Partisipasi anggota dalam memanfaatkan pelayanan yang disediakan koperasi. (Rusidi, 1992: 18)

Menurut Sukamdiyo (1996: 124) partisipasi anggota harus terwujud dalam tindakan nyata sehari-hari. Misalnya berbelanja atau transaksi dengan koperasi

dan memasyarakatkan koperasi kepada lingkungan. Partisipasi anggota dalam manajemen juga harus direalisasikan melalui berbagai cara:

1. Menerima dan melaksanakan Anggaran Dasar dan keputusan rapat anggota
2. Memilih serta memberhentikan pengurus dan pengawas
3. Mengesahkan Anggaran Dasar dan investasi yang penting
4. Mengawasi pengurus dan pengelola secara dinamis
5. Mengusulkan permodalan koperasi sesuai keputusan masing-masing.
6. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.
7. Melakukan transaksi dan aktif dalam kegiatan koperasi.
8. Memberi kritik dan saran terhadap pelaksanaan pengurus
9. Mengikuti dan mendorong perkembangan koperasi.

Partisipasi anggota terdiri dari beberapa jenis, baik partisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi (transaksi jual/beli atau simpan pinjam dengan koperasi), partisipasi dalam pemupukan modal (kesadaran anggota dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, yaitu membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela), partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengikuti rapat, partisipasi pengawasan (Herdiana: 2009). Sehingga partisipasi ekonomi anggota dalam hal ini adalah keterlibatan anggota dalam kegiatan ekonomi koperasi dan pemupukan modal.

Partisipasi anggota diukur dari kesediaan anggota untuk ikut memikul dan menjalankan hak keanggotaan secara sadar dan bertanggungjawab (Anoraga dan Widyati 2003: 111). Hal ini memungkinkan bahwa partisipasi anggota harus dilakukan dengan diberikan suatu motivasi agar anggota mau berpartisipasi aktif di koperasi.

Menurut Sugiyanto (2002), mengukur keberhasilan koperasi jangan hanya dilihat dari sisi kemampuan dalam menghasilkan SHU, tetapi yang utama harus dilihat dari kemampuan dalam mempromosikan ekonomi anggotanya (benefit ekonomi). Pendapat tersebut sesuai pendapat Ropke (2003), koperasi akan sangat menarik bila dapat memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya. Oleh karena itu, orang akan tertarik menjadi anggota suatu koperasi hanya karena mereka akan memperoleh manfaat dari koperasi. Jika manfaat ekonomi yang diperoleh anggota besar, maka anggota mau berpartisipasi secara aktif pada koperasi tersebut, karena salah satu jenis partisipasi anggota adalah partisipasi dalam menikmati manfaat. Sebagaimana yang diungkapkan Ropke (2003) partisipasi dapat digambarkan dalam tiga jenis :

1. Partisipasi anggota dalam mengkontribusikan atau menggerakkan sumber-sumber dayanya.
2. Partisipasi anggota dalam mengambil keputusan (perencanaan, implementasi/pelaksanaan, evaluasi).
3. Partisipasi anggota dalam menikmati manfaat.

Partisipasi anggota dalam mengkontribusikan sumber-sumber dayanya, salah satunya adalah pemupukan modal, memberikan kesempatan kepada koperasi untuk memproduksi barang dan jasa, menjalankan organisasi, dan membeli fasilitas atau sarana produksi. Oleh karena itu semakin besar modal koperasi tersebut maka semakin besar pula peluang koperasi untuk memperluas jangkauan usahanya sehingga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan atau memperbesar volume usahanya. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

maupun pengawasan akan mendorong pengurus koperasi untuk lebih bertanggungjawab dan meningkatkan dedikasinya untuk kepentingan koperasi.

Kepentingan itu diwujudkan melalui peningkatan manajemen seperti kerapian dan kelengkapan administrasi maupun pembukuan, tertibnya pembagian SHU dan pemilikan perangkat organisasi, tertibnya imbalan kepada personil yang menduduki jabatan dalam koperasi maupun dalam penyelenggaraan pertemuan dengan anggota. Partisipasi anggota dalam menikmati manfaat, yaitu memanfaatkan segala sarana dan prasarana serta pelayanan yang disediakan oleh koperasi untuk kesejahteraan para anggotanya.

Menurut Hasnawati (2003: 9) ciri-ciri anggota yang berpartisipasi baik dapatlah dirumuskan sebagai berikut:

1. Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib secara tertib.
2. Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan anggota secara aktif.
3. Menggunakan hak untuk mengawasi jalannya usaha koperasi mengetahui anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan-peraturan lainnya dan keputusan bersama lainnya.
4. Aktif dalam melakukan transaksi yang dilayani koperasi baik unit simpan pinjam maupun unit toko.
5. Aktif dalam melunasi iuran pokok, iuran wajib dan iuran sukarela.

Agar koperasi tetap eksis maka partisipasi anggota selalu ditingkatkan dari hari ke hari dan tahun ke tahun, untuk itu dibutuhkan pendidikan perkoperasian yang standar, terprogram dan berkelanjutan bagi anggota. Dalam situs [lapenkopnas.com](http://lapenkopnas.com) tujuan pendidikan anggota adalah meningkatkan :



- a. Kontribusi modal anggota
- b. Kesadaran anggota untuk memanfaatkan pelayanan usaha koperasi
- c. Keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan
- d. Pengawasan anggota terhadap koperasinya

Sementara itu dalam lapenkopnas (2002:8) menyiratkan tentang partisipasi anggota yang berkaitan dengan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah partisipasi anggota dalam melakukan transaksi di koperasi dan partisipasi modal (jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib).

Adapun kiat-kiat untuk meningkatkan partisipasi anggota menurut David Corten (Ropke, 1988) bahwa untuk mencapai partisipasi anggota yang efektif harus bekerja “Model 3 kesesuaian” (*The fit model of participation*), yakni perlu ada kesesuaian antara :

1. Kesesuaian antara output program koperasi dengan kebutuhan atau keinginan para anggotanya;
2. Kesesuaian antara permintaan anggota dengan keputusan-keputusan pelayanan koperasi;
3. Kesesuaian antara tugas program koperasi dengan kemampuan manajemen koperasi.

Dari uraian diatas teori yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Partisipasi ekonomi anggota sebagai pemilik (permodalan) meliputi melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.

- b. Partisipasi ekonomi anggota sebagai pengguna, yakni melakukan transaksi dengan koperasi baik simpan pinjam maupun unit yang lainnya, dan pengembalian piutang.

### **2.5.1 Simpanan Pokok**

Undang-undang koperasi menyatakan dalam pasal 33 ayat 1 bahwa “Simpanan pokok tidak dapat diambil selama anggotanya yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi ” Dijelaskan dalam Pasal 33 ayat 2 bahwa “Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota”. Membayar simpanan pokok merupakan bentuk partisipasi anggota sebagai pemilik dalam hal permodalan.

Menurut Hadiwidjaja (2001:9) “Selama seseorang atau badan hukum koperasi menjadi anggota koperasi yang bersangkutan simpanan pokok tidak boleh diambil, maka simpanan pokok tergolong kepada kelompok modal pemilik koperasi atau modal sendiri koperasi”. Modal sendiri ini dapat dilihat secara langsung pada neraca keuangan dan laporan rugi-laba koperasi. Jumlah simpanan pokok sama untuk semua anggota yang telah ditentukan oleh AD/ART.

Menurut pendapat Gito Sudarmo dan Basri (2003: 37) bahwa dengan modal usaha yang lebih dari cukup diharapkan dapat mengurangi resiko dan meningkatkan penghasilan atau laba. Selain itu, pembelanjaan yang sehat itu pertama-tama dibangun atas dasar modal sendiri yaitu modal yang tahan resiko (Riyanto, 2001: 23).

Pelunasan simpanan pokok anggota didasarkan pada persentase pelunasan simpanan pokok anggota yang diterima koperasi. Jumlah simpanan pokok yang telah dibayar dibandingkan dengan jumlah simpanan pokok yang seharusnya dilunasi pada tahun yang bersangkutan. Rumus untuk mencari pelunasan simpanan pokok anggota sebagai berikut:

$$\text{Pelunasan Simpanan Pokok anggota} = \frac{\text{Jumlah simpanan pokok telah dibayar}}{\text{Jumlah simpanan pokok yang harus lunas}} \times 100\%$$

### 2.5.2 Simpanan Wajib

Dalam Pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa “Simpanan wajib dapat diambil kembali dengan cara-cara yang dapat diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota dengan mengutamakan kepentingan koperasi”. Simpanan wajib ini, tidaklah modal permanen koperasi sesuai yang diatur Undang-Undang koperasi bahwa simpanan wajib dapat diambil kembali setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Membayar simpanan wajib merupakan bentuk partisipasi anggota sebagai pemilik dalam hal permodalan.

Simpanan wajib adalah simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk menyetornya dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan ini dapat ditarik kembali dengan cara dan waktu yang ditentukan oleh koperasi, oleh Anggaran Dasar, Anggran Rumah Tangga, dan keputusan-keputusan Rapat Anggota dengan mengutamakan kepentingan koperasi.

Pelunasan simpanan wajib anggota didasarkan persentase simpanan wajib anggota yang diterima Koperasi sesuai dengan AD/ART koperasi yang bersangkutan. Jumlah simpanan wajib yang telah dibayarkan dibandingkan dengan jumlah simpanan wajib yang seharusnya dilunasi pada tahun yang bersangkutan. Rumus untuk mencari pelunasan simpanan wajib anggota sebagai berikut:

Pelunasan simpanan wajib anggota

$$= \frac{\text{Jumlah simpanan wajib yang telah dibayar}}{\text{Jumlah simpanan wajib yang harus lunas}} \times 100\%$$

### 2.5.3 Transaksi Anggota Terhadap Koperasi

Transaksi anggota terhadap usaha koperasi. Rumus untuk mencari transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota sebagai berikut:

Transaksi usaha koperasi dengan anggota

$$= \frac{\text{Transaksi anggota}}{\text{Total transaksi seluruhnya}} \times 100\%$$

### 3.4.4 Penagihan piutang

Menurut Rudianto (2010: 145) piutang adalah klaim koperasi atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu. Piutang anggota adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan koperasi kepada anggota koperasi. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 2007 yang berlaku di Indonesia, piutang dicatat dan diakui sebesar jumlah bruto (nilai jatuh tempo) dikurangi taksiran jumlah yang tidak akan

diterima. Hal itu berarti piutang harus dicatat sebesar jumlah yang diharapkan dapat ditagih karena berkaitan dengan pengelolaan piutang.

Rata-rata pengembalian piutang digunakan untuk menaksir usaha dan dihitung dengan membagi piutang usaha dengan rata-rata penjualan harian untuk menentukan jumlah hari penjualan dalam piutang usaha. rata-rata penagihan piutang menunjukkan jangka waktu rata-rata yang harus ditungg koperasi setelah melakukan transaksi kredit .

Rata-rata pengembalian piutang

$$= \frac{\text{Piutang}}{\text{Penjualan tahunan/ 360}}$$

## 2.5 Penelitian Terdahulu

### 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun	Judul,	Variable	Hasil
Anita Prihastuti, 2007, kinerja Pegawai Indonesia anggota PKPRI Kota Magelang Tahun 2004-2005	Analisis Koperasi Republik (KPRI) Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi pengurus terhadap pengukuran kinerja koperasi.</li> <li>2. Persepsi KPRI atas peran serta pemerintah dalam pengukuran kinerja.</li> <li>3. Penilaian terhadap penerapan pengukuran kinerja sesuai dengan pedoman klasifikasi koperasi (KepMenNo.129/Kep/M/KU KM/XI/2002)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alasan KPRI di Kota Magelang menggunakan rasio rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas karena pengetahuan, pemahaman, dan motivasi pengurus tentang pengukuran kinerja koperasi yang rendah</li> <li>2. Peran serta pemerintah dalam pengukuran kinerja koperasi sangat</li> </ol>

		<p>kurang.</p> <p>3. Kinerja KPRI Kota Magelang apabila diukur dengan Kep Men No.129/Kep/M/KUKM/XI/2002 memperoleh rata-rata 70.03%</p>
<p>Nurul Eka Mayasari, 2008, Analisi kinerja dan persepsi pengurus terhadap Koperasi Primer anggota PKPRI Kabupaten Blora tahun 2005-2006</p>	<p>1. Persepsi pengurus terhadap pengukuran kinerja koperasi.</p> <p>2. Persepsi KPRI atas peran serta pemerintah dalam pengukuran kinerja.</p> <p>3. Penilaian terhadap penerapan pengukuran kinerja sesuai dengan pedoman klasifikasi koperasi (KepMen No. 129/Kep/M/KUKM/XI/2002)</p>	<p>1. Alasan KPRI di Kabupaten Blora menggunakan rasio rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas karena pengetahuan, pemahaman, dan motivasi pengurus tentang pengukuran kinerja koperasi yang masih rendah.</p> <p>2. Dinas Koperasi tidak pernah mensosialisasikan aturan pengukuran kinerja koperasi.</p> <p>3. Kinerja KPRI Kabupaten Blora apabila diukur dengan Kep Men No. 129/Kep/M/KUKM/XI/2002 memperoleh rata-rata 68.60%</p>
<p>Eli Dewi Riani, 2007, Kinerja</p>	<p>1. Persepsi pengurus terhadap pengukuran kinerja</p>	<p>1. KPRI di Kabupaten Pemalang menggunakan</p>

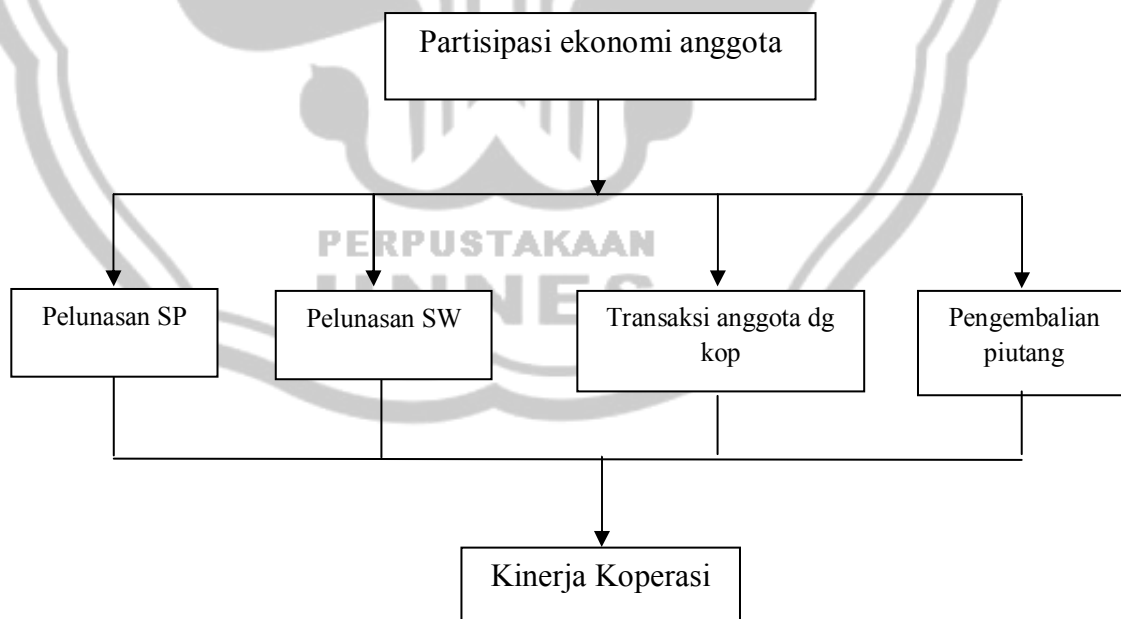
<p>koperasi berdasarkan KepMen No.129/Kep/M/KUKM/XI/2002 hambatan, permasalahan dan implementasinya pada KPRI Kabupaten Pemalang</p>	<p>koperasi.</p> <p>2. Persepsi KPRI atas peran serta pemerintah dalam pengukuran kinerja koperasi.</p> <p>3. Pengukuran kinerja sesuai dengan pedoman klasifikasi Koperasi (Kep. Men No.129/KEP/MUKMMI/XI/2002)</p>	<p>rasio rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas karena pengetahuan, pemahaman, dan motivasi pengurus tentang pengukuran kinerja koperasi yang masih rendah.</p> <p>2. Dinas Koperasi tidak pernah mensosialisasikan aturan kinerja koperasi, pengukuran kinerja koperasi dan pendidikan dan latihan pada pengurus koperasi.</p> <p>3. Kinerja KPRI Kabupaten Pemalang apabila diukur dengan KepMen No. 129/Kep/M/KUKM/XI/2002 memperoleh rata-rata 67.05%</p>
<p>Manu Manjaya, 2010, Kinerja keuangan koperasi aspek otonomi dan kemandirian</p>	<p>Rentabilitas modal sendiri, ROA, ATO, produktivitas, likuiditas, solvabilitas, dan modal sendiri terhadap hutang</p>	<p>Rentabilitas modal sendiri, liquiditas dan solvabilitas cukup baik. ROA, ATO dan modal sendiri terhadap hutang sangat baik. Provitabilitas baik.</p>

## 2.6 Kerangka Berpikir

Pengukuran kinerja perusahaan maupun badan usaha seperti koperasi sangat penting karena dengan pengukuran kinerja pengelola dapat mengetahui efektivitas dan efisiensi *revenue cost*, *pengguna asset*, proses operasional manajemen dari koperasi (Ikhsan, 2005:5). Pengukuran kinerja untuk memotivasi karyawan dalam pencapaian tujuan organisasi dan dalam mematuhi standart perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.(Siegel & Marconi, 1989:199).

Pengukuran kinerja dengan partisipasi ekonomi anggota dapat dilihat melalui pelunasan simpanan pokok, simpanan wajib, transaksi anggota dan penagihan piutang. Dari uraian diatas, kerangka berpikir dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

**Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di KPRI Kabupaten Rembang yang berjumlah 58 KPRI.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Berdasarkan karakteristik masalahnya, jenis penelitian yang dilaksanakan adalah termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah studi menemukan fakta-fakta dengan menginterpretasi yang tepat untuk mengenal fenomena guna keperluan selanjutnya.

#### **3.3 Objek Penelitian**

Objek penelitiannya adalah kinerja koperasi RLS meliputi rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas; aspek partisipasi ekonomi anggota.

#### **3.4 Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002:109). Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang terdiri atas manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian (Nawawi, 1993:

4). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh KPRI di Kabupaten Rembang yang berjumlah 58 KPRI.

### 3.5 Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu (Sudjana, 1992:161). Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih secara cermat untuk mewakili populasi (Cooper dan Emory, 1996).

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sample*. Sampel bertujuan (*purposive sample*) dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Pengambilan sampel penelitian ini dengan alasan yaitu:

1. KPRI yang sudah melakukan RAT dua tahun terakhir (2009 dan 2010), karena untuk menghitung piutang dan mengukur kinerja KPRI.
2. KPRI yang minimal memiliki klasifikasi berkualitas, karena datanya relatif lebih lengkap dibanding dengan klasifikasi dibawahnya.

Berdasarkan alasan di atas diperoleh sampel sejumlah sepuluh KPRI.

Adapun sampel tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Sampel KPRI Kabupaten Rembang**

NO	Nama KPRI	Badan Hukum
1.	Hebad	5562.c/BH/PAD/KWK.11/VI/1996
2.	Ngudi Santoso	9235.c/BH/PAD/KWK.11/IX/2001
3.	Mizan	10853.a/BH/PAD/KWK.11/III/1997
4.	Keluarga 1	10592.b/BH/PAD/KWK.11/X/1996
5.	Handayani	2293.b/BH/PAD/KWK.11/III/1996
6.	Pamekar	5561.c/BH/PAD/KWK.11/X/1996

7.	Usaha Sejahtera	10191.a/BH/PAD/KWK.11/XI/1996
8.	Kuncoro	10896.a/BH/PAD/KWK.11/IX/1995
9.	Keluarga 2	9394.c/BH/PAD/518-27/IX/2003
10.	Bahagia	10816.a/BH/PAD/KWK.11/VI/1996

Sumber: PKPRI Kabupaten Rembang 2010

### 3.6 Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Suharsimi adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu kinerja koperasi RLS dan aspek partisipasi ekonomi anggota dengan indikator sebagai berikut:

#### 1. Rentabilitas

Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dan dinyatakan dengan persentase (Riyanto, 2001: 35). Dalam perhitungannya rentabilitas modal sendiri hal ini yang harus dicari dalam besarnya untung bersih dibandingkan dengan jumlah modal sendiri.

#### 2. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Dalam perhitungannya likuiditas dapat dicari dari perbandingan antara aktiva lancar dengan pasiva lancar.

### 3. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Solvabilitas dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh dari proses menganalisis rasio yang berhubungan dengan pelunasan kewajiban serta pengembalian modal. Dalam perhitungannya solvabilitas dapat dicari dari perbandingan antara total aktiva dengan total kewajiban.

### 4. Pelunasan simpanan pokok

Pelunasan simpanan pokok anggota didasarkan pada persentase pelunasan simpanan pokok anggota yang diterima koperasi. Jumlah simpanan pokok yang telah dibayar dibandingkan dengan jumlah simpanan pokok yang seharusnya dilunasi pada tahun yang bersangkutan.

### 5. Pelunasan simpanan wajib.

Pelunasan simpanan wajib anggota didasarkan persentase simpanan wajib anggota yang diterima koperasi sesuai dengan AD/ART koperasi yang bersangkutan. Jumlah simpanan wajib yang telah dibayarkan dibandingkan dengan jumlah simpanan wajib yang seharusnya dilunasi pada tahun yang bersangkutan.

### 6. Transaksi anggota terhadap koperasi

Transaksi anggota dengan merupakan perbandingan antara transaksi yang dilakukan anggota kepada koperasi terhadap total transaksi koperasi.

## 7. Penagihan piutang

Penagihan piutang merupakan kemampuan koperasi dalam menagih piutangnya.

## 3.7 Jenis Data

### 3.7.1 Jenis data menurut sifatnya

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah laporan keuangan yang meliputi neraca dan laporan laba rugi sepuluh KPRI di Kabupaten Rembang tahun 2010.

### 3.7.2 Jenis data menurut sumbernya

#### a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Adapun perolehan data primer dalam penelitian ini dengan cara wawancara atau interview dengan pengurus dan karyawan.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan, dilaporkan oleh orang lain yang berada di luar penyidik itu sendiri. Data yang diperoleh berupa data laporan keuangan tahun 2010 dari sepuluh KPRI di Kabupaten Rembang.

## **3.8 Pengumpulan Data**

### **3.8.1 Metode dokumentasi**

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 1996:48). Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2010 dari sepuluh KPRI Kabupaten Rembang. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kinerja KPRI se- Kabupaten Rembang.

### **3.8.2 Wawancara**

Wawancara atau kuesioner lisan merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Wawancara dilakukan sebagai pendukung dan pelengkap dari metode dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota di KPRI Kabupaten Rembang. Hal ini agar data yang dimaksud oleh peneliti sesuai dengan harapan.

## **3.9 Teknik Analisis Data**

Sugiono (2005:92) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah

dipahami oleh dirisendiri maupun orang lain. Analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kuantitatif.

### 3.9.1 Analisis deskriptif kuantitatif

Setelah data penelitian diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan data penelitian setelah dinalisis dengan analisis rasio sebagai berikut:

#### Pengukuran Kinerja dengan RLS

##### 1. Rentabilitas

Rentabilitas dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rentabilitas} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

(Riyanto, 2001: 50)

##### 2. Likuiditas

Dalam perhitungannya likuiditas dapat dicari dari perbandingan antara aktiva lancar dengan pasiva lancar. Likuiditas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Pasiva lancar}} \times 100\%$$

(Riyanto, 2001: 38)

##### 3. Solvabilitas

Solvabilitas dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Solvabilitas} = \frac{\text{Total aktiva}}{\text{Total kewajiban}} \times 100\%$$

(Riyanto, 2001: 37)

## Pengukuran Kinerja Dengan Partisipasi Ekonomi Anggota

### 1. Pelunasan Simpanan Pokok

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah simpanan pokok yang dibayar}}{\text{Jumlah simpanan pokok yang seharusnya lunas}} \times 100\%$$

Di mana rasio dalam bentuk persentase. Rasio yang dihasilkan menunjukkan persentase yang lebih besar kategori yang telah ditetapkan maka usaha koperasi berjalan baik, tetapi sebaliknya bila rasio kurang dari standar.

### 2. Pelunasan Simpanan Wajib

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah simpanan wajib telah dibayar}}{\text{Jumlah simpanan wajib yang seharusnya lunas}} \times 100\%$$

### 3. Transaksi usaha Koperasi dengan usaha anggota

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Transaksi anggota terhadap koperasi}}{\text{Total transaksi seluruhnya}} \times 100\%$$

### 4. Penagihan piutang

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah piutang}}{\text{Penjualan tahunan/ 360}}$$

Untuk mengukur kinerja koperasi dengan partisipasi ekonomi anggota dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio yaitu pelunasan simpanan pokok, pelunasan simpanan wajib, transaksi anggota terhadap koperasi dan pengembalian piutang. Hasil dari perhitungan rasio tersebut dapat memberi gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu koperasi apabila dibandingkan dengan angka rasio kategori.



Cara memasukkan skor kedalam kategori indikator:

Persentase tertinggi	= 100%
Persentase terendah	= 25%
Rentang persentase	= 100% - 25% = 75%
Panjang kelas interval	= 75% : 4 = 18,75%

Dengan panjang kelas 18,75% = 19% dan persentase terendah 25% dapat dibuat kriteria sebagai berikut:

82 % - 100%	Sangat baik	
63% - 81%	Baik	
44% - 62%	Cukup baik	
≤ 43%	Kurang baik	(Muhammad Ali, 1994: 184)

Penilaian terhadap kinerja dilakukan dengan menghitung rasio-rasio yang menjadi indikator-indikator dari kinerja koperasi pada aspek partisipasi ekonomi anggota untuk kemudian dimasukan dalam salah satu kategori. Adapun cara yang digunakan untuk menganalisis data sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Penilaian simpanan pokok**

Kelas	Kriteria
82% - 100%	Sangat baik
63% - 81%	Baik
44% - 62%	Cukup baik
≤ 43%	Kurang baik

Sumber: Muhammad Ali: 1994

**Tabel 3.2 Penilaian Simpanan Wajib**

Kelas	Kriteria
82% - 100%	Sangat baik

63% - 81%	Baik
44% - 62%	Cukup baik
≤ 43%	Kurang baik

Sumber: Muhammad Ali: 1994

**Tabel 3.4 Penilaian transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota**

Kelas	Kriteria
82% - 100%	Sangat baik
63% - 81%	Baik
44% - 62%	Cukup baik
≤ 43%	Kurang baik

Sumber: Muhammad Ali: 1994

**Tabel 3.5 Penilaian pengembalian piutang**

Kelas	Kriteria
≤ 43 hari	Sangat baik
44 hari – 62 hari	Baik
63 hari – 81 hari	Cukup baik
82 hari – 100 hari	Kurang baik

Sumber: Muhammad Ali: 1994

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum KPRI di Kabupaten Rembang**

Koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Pada awalnya tujuan pendirian KPRI didasarkan pada dorongan untuk membantu meringankan beban pegawai negeri dalam memenuhi kebutuhannya, serta meningkatkan kesejahteraan. Disamping itu KPRI mempunyai tanggung jawab lain yaitu ikut serta dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun tujuan dari didirikannya KPRI adalah untuk:

1. Memperbaiki kualitas hidup anggotanya (pegawai negeri).
2. Mempertinggi taraf hidup anggotanya sebagai dasar landasan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Pemberian jasa, pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis koperasi.
4. Memperoleh keuntungan ekonomis.

#### 4.1.2 Bidang Usaha Koperasi

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Rembang yang terdaftar dalam PKPRI Kabupaten Rembang berjumlah 58. Setiap KPRI di Kabupaten Rembang memiliki unit usaha utama yang menjadi penopang kelangsungan hidup koperasi yaitu simpan pinjam (USP). disamping itu KPRI di Kabupaten Rembang juga memiliki unit usaha pertokoan yang menjual berbagai macam kebutuhan anggota koperasi. Unit pertokoan ini diutamakan untuk melayani kebutuhan anggota berupa barang dengan pembelian kontan maupun kredit. Barang-barang yang dijual pada unit pertokoan ini antara lain; sembako, barang-barang konsumsi, kelontong, konveksi dan alat tulis. Namun tidak semua KPRI menjalankan usaha tersebut. Jenis usaha yang dikelola KPRI Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Simpan pinjam

- a. Tabungan

Usaha ini merupakan simpanan dari anggota dan sifatnya sukarela. Simpanan ini bisa diambil sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Bunga simpanan disesuaikan dengan bunga bank pada umumnya.

- b. Pinjaman

Usaha ini merupakan pinjaman uang kepada anggota dengan mengajukan permohonan dimana sumber dana berasal dari simpanan anggota. Piutang ini diangsur setiap bulan.

## 2. Pertokoan

Usaha ini menyediakan barang-barang kebutuhan untuk anggota dan non-anggota baik secara tunai maupun kredit. Barang yang disediakan berupa kebutuhan sehari-hari (konsumsi), pakaian, alat tulis kantor dan sebagainya. sebagian besar pembelinya adalah anggota.

## 3. Usaha jasa

### a. Fotocopy

Usaha ini tidak hanya melayani anggota saja tetapi juga masyarakat umum. Kebanyakan para pemakai atau pelanggannya adalah anggota.

### b. Persewaan kursi

Usaha ini tidak hanya melayani persewaan kursi bagi anggota saja tetapi juga masyarakat umum. kebanyakan pelanggannya adalah anggota.

### c. Persewaan gedung

Usaha ini melayani persewaan gedung untuk acara resepsi pernikahan atau lapangan bulutangkis tidak hanya bagi anggota saja tetapi juga masyarakat umum. Tetapi kebanyakan pelanggannya adalah anggota.

### d. Pembayaran rekening listrik dan air

Usaha ini melayani pembayaran rekening listrik dan air dari anggota.

### **4.1.3 Struktur Organisasi KPRI Di Kabupaten Rembang**

Organisasi merupakan wadah kerjasama dalam mencapai tujuan yang berhubungan dengan penentuan tugas dan tanggungjawab, pengelompokan, suatu penentuan hubungan kerja antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Agar organisasi KPRI dapat berjalan dengan baik, perlu adanya penyusunan struktur

organisasi untuk memperjelas tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak. Adapun struktur organisasi KPRI Kabupaten Rembang pada umumnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KPRI. Keputusan rapat sebisa mungkin diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu, masing-masing anggota mempunyai hak suara yang sama dalam rapat. Rapat anggota juga berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi pada setiap akhir tahun tutup buku. Pelaksanaan rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam setahun dan untuk penyelenggaraan pengesahan pertanggungjawaban diselenggarakan paling lambat tiga bulan setelah tahun buku berakhir.

#### 2. Pengurus

Pengurus bertanggungjawab terhadap segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota dengan masa jabatan paling lama lima tahun berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar. Susunan pengurus dalam KPRI terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

#### 3. Pengawas

Pengawas KPRI adalah orang-orang/ anggota KPRI yang diberi kepercayaan oleh seluruh anggota untuk mengadakan atau melakukan pemeriksaan jalannya KPRI. Pengawas melakukan penelitian dan pembinaan pada kegiatan organisasi dan usaha KPRI yang hasilnya akan dilaporkan pada

pengurus secara tertulis dan salinannya dikirim kepada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Rembang. Pengawas juga mengikuti rapat dengan pengurus dalam langkah-langkah pengembangan KPRI serta mengadakan rapat lengkap badan pengawas secara rutin untuk menghimpun materi dalam laporan triwulan maupun tahunan.

#### **4.1.4 Deskripsi Data Sampel**

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* yaitu cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata random atau daerah tetapi didasarkan tujuan. Penelitian ini merupakan penelitian dekriptif. Adapun yang menjadi masalah berupa fakta-fakta dari suatu populasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kinerja KPRI dengan kriteria sebagai berikut:

1. KPRI yang telah melakukan RAT dua tahun terakhir (2009 dan 2010).
2. KPRI yang minimal mempunyai klasifikasi berkualitas.

Berdasarkan kriteria diatas didapat sampel sejumlah sepuluh KPRI yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

#### **4.1.5 Kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Se-Kabupaten**

##### **Rembang**

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui penelitian kinerja koperasi yaitu analisis data deskriptif persentase. Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

## Pengukuran Kinerja KPRI Dengan Rentabilitas, Likuiditas Dan Solvabilitas (RLS)

### 1. Rentabilitas

Dalam perhitungan rentabilitas modal sendiri dapat dicari dalam besarnya untung bersih dibandingkan dengan jumlah modal sendiri. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1 Hasil Analisis Rentabilitas**

Nama KPRI	SHU bersih	Modal sendiri	Rentabilitas %
Hebad	43.063.461,00	901.158.202,00	4,78
Ngudi Santoso	10.983.900,00	439.009.701,20	2,50
Mizan	16.605.284,00	73.640.801,00	22,55
Keluarga 1	19.060.512,33	104.717.467,36	18,20
Handayani	164.084.003,00	894.546.186,00	18,34
Pamekar	48.884.815,00	946.630.797,00	5,16
Usaha Sejahtera	45.767.150,00	421.888.379,85	10,85
Kuncoro	4.343.950,00	93.137.941,00	4,66
Keluarga 2	14.806.325,00	189.366.370,00	7,82
Bahagia	4.200.000,00	104.950.725,00	4,00
<b>Jumlah</b>			<b>98,9</b>
<b>Rata-rata</b>			<b>9,89</b>

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.1 rentabilitas pada KPRI Hebad sebesar 4,78% , pada KPRI Ngudi Santoso sebesar 2,50%. Sedangkan KPRI Mizan dan Keluarga rentabilitas sebesar 22,55% dan 18,20%, pada KPRI Handayani 18,34%. KPRI Pamekar memiliki rentabilitas sebesar 5,16%, KPRI Usaha Sejahtera, Kuncoro dan Keluarga 2 memiliki rentabilitas sebesar 10,85%, 4,66% dan 7,82%. Sedangkan pada



KPRI Bahagia memiliki rentabilitas sebesar 4%. Mean atau rata-rata perhitungan rentabilitas dari sepuluh KPRI di Kabupaten Rembang sebesar 9,98% .

## 2. Likuiditas

Likuiditas dapat dicari dengan membandingkan aktiva lancar dengan pasiva lancar. Berikut hasil penelitian:

**Tabel 4.2 Hasil Analisis Likuiditas**

<b>Nama KPRI</b>	<b>Aktiva lancar</b>	<b>Pasiva lancar</b>	<b>Likuiditas %</b>
Hebad	2.024.691.692,00	172.582.143,00	1173,18
Ngudi Santoso	444.347.423,20	843.13.649,00	527,02
Mizan	154.708.703,00	65.341.598,00	236,77
Keluarga 1	176.032.852,04	55.962.867,22	314,55
Handayani	2.035.215.007,00	811.796.742,00	250,70
Pamekar	1.755.623.273,00	826.938.187,00	212,30
Usaha Sejahtera	1.195.918.033,00	139.472.434,15	857,46
Kuncoro	59.357.356,00	12.901.663,00	460,08
Keluarga 2	312.362.421,00	116.635.991,00	267,81
Bahagia	161.772.445,00	75.322.910,00	214,77
<b>Jumlah</b>			<b>4514,6</b>
<b>Rata-rata</b>			<b>451,46</b>

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 likuiditas pada KPRI Hebad sebesar 1173,18% , pada KPRI Ngudi Santoso sebesar 527,02%. Sedangkan KPRI Mizan dan Keluarga 1 likuiditas sebesar 236,77% dan 314,55%, pada KPRI Handayani 250,70%. KPRI Pamekar memiliki likuiditas sebesar 212,30%, KPRI Usaha Sejahtera, Kuncoro dan Keluarga 2 memiliki likuiditas sebesar 857,46%, 460,08% dan 267,81%. Sedangkan pada KPRI Bahagia memiliki likuiditas sebesar

214,77%. Mean atau rata-rata perhitungan likuiditas dari sepuluh KPRI di Kabupaten Rembang sebesar 451,45% .

### 3. Solvabilitas

Dalam perhitungannya solvabilitas dapat dicari dari perbandingan antara total aktiva dengan total kewajiban. berikut hasil penelitiannya:

**Tabel 4.3 Hasil Analisis Solvabilitas**

<b>Nama KPRI</b>	<b>Total aktiva</b>	<b>Total kewajiban</b>	<b>Solvabilitas %</b>
Hebad	2.239.576.244,00	1.295.354.581,00	172,90
Ngudi Santoso	581.060.157,20	131.066.556,00	443,33
Mizan	161.587.683,00	71.341.598,00	226,50
Keluarga 1	179.740.846,93	55.962.867,22	321,18
Handayani	2.134.955.814,00	986.325.625,00	216,46
Pamekar	1.903.435.097,00	943.919.485,00	201,65
Usaha Sejahtera	1.296.628.864,00	828.973.334,10	156,41
Kuncoro	63.861.840,00	12.901.663,00	494,99
Keluarga 2	320.808.686,00	116.635.991,00	275,05
Bahagia	184.473.635,00	75.322.910,00	244,91
<b>Jumlah</b>			<b>2753,4</b>
<b>Rata-rata</b>			<b>275,34</b>

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 solvabilitas pada KPRI Hebad sebesar 172,90% , pada KPRI Ngudi Santoso sebesar 443,33%. Sedangkan KPRI Mizan dan Keluarga 1 solvabilitas sebesar 226,50% dan 321,18%, pada KPRI Handayani 216,46%. KPRI Pamekar memiliki solvabilitas sebesar 201,65%, KPRI Usaha Sejahtera, Kuncoro dan Keluarga 2 memiliki solvabilitas sebesar 156,41%, 494,99% dan 275,05%. Sedangkan pada KPRI Bahagia memiliki solvabilitas

sebesar 244,91%. Mean atau rata-rata perhitungan solvabilitas dari sepuluh KPRI di Kabupaten Rembang sebesar 275,34% .

### **Pengukuran Kinerja Dengan Partisipasi Ekonomi Anggota**

#### 1. Pelunasan simpanan pokok

Pelunasan simpanan pokok anggota dapat dilihat dari deskripsi persentase pelunasan simpanan pokok anggota yang diterima koperasi. Dengan kata lain pelunasan simpanan pokok dapat dilihat dari perbandingan jumlah simpanan pokok yang telah dibayarkan dengan jumlah simpanan pokok yang seharusnya lunas. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4 Pelunasan Simpanan Pokok**

<b>No.</b>	<b>Nama KPRI</b>	<b>Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA) %</b>	<b>Nilai</b>	<b>Kriteria</b>
1	Hebad	100	100	Sangat baik
2	Ngudi Santosa	100	100	Sangat baik
3	Mizan	100	100	Sangat baik
4	Keluarga 1	100	100	Sangat baik
5	Handayani	97,10	100	Sangat baik
6	Pamekar	99,91	100	Sangat baik
7	Usaha Sejahtera	100	100	Sangat baik
8	Kuncoro	100	100	Sangat baik
9	Keluarga 2	100	100	Sangat baik
10	Bahagia	95,95	100	Sangat baik
Total		992,96		
Mean/ Rata-rata		99,30	100	Sangat baik

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 pelunasan simpanan pokok pada KPRI Hebad sebesar 100% hal ini menunjukkan bahwa pelunasan simpanan pokok koperasi sangat baik, KPRI Ngudi Santoso sebesar 100% hal ini menunjukkan Koperasi sangat baik. sedangkan KPRI Mizan dan Keluarga pelunasan simpanan pokok sebesar 100% hal tersebut menunjukkan kategori koperasi sangat baik, KPRI Handayani 97,10% hal ini menunjukkan koperasi sangat baik. KPRI Pamekar pelunasan simpanan pokok sebesar 99,91% hal tersebut berarti kriteria koperasi sangat baik, KPRI Usaha Sejahtera, Kuncoro dan Keluarga sebesar 100% hal ini berarti kriteria koperasi sangat baik. Sedangkan pada KPRI Bahagia pelunasan piutang sebesar 95,95% menunjukkan pelunasan simpanan pokok sangat baik. Mean atau rata-rata perhitungan pelunasan simpanan pokok dari sepuluh KPRI di Kabupaten Rembang sebesar 99,30% hal ini menunjukkan bahwa pelunasan simpanan pokok dari sepuluh KPRI di Kabupaten Rembang dalam kriteria sangat baik.

**Tabel 4.5 Pelunasan Simpanan Pokok**

<b>Kriteria</b>	<b>F</b>	<b>%</b>	<b>Skor</b>	<b>Kategori</b>
82% - 100%	10	100	100	Sangat Baik
63% - 81%	0	0	0	Baik
44% - 62%	0	0	0	Cukup Baik
≤ 43%	0	0	0	Kurang Baik
Jumlah	10	100		

sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh pelunasan simpanan pokok 100% atau sepuluh KPRI termasuk dalam kriteria sangat baik yaitu berada pada skor 82% -

100%. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja KPRI Kabupaten Rembang bila dilihat dari segi pelunasan simpanan pokok sangat baik yaitu 99,30% dengan nilai sebesar 100.

## 2. Pelunasan simpanan wajib

Pelunasan simpanan wajib koperasi oleh anggota dapat dilihat dari perbandingan jumlah simpanan wajib yang dibayarkan anggota dengan jumlah simpanan wajib yang seharusnya lunas pada tahun yang bersangkutan. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6 Pelunasan Simpanan Wajib**

No	Nama KPRI	PEA %	Nilai	Kriteria
1	Hebad	91,20	100	Sangat baik
2	Ngudi Santosa	99,22	100	Sangat baik
3	Mizan	99,80	100	Sangat baik
4	Keluarga 1	100	100	Sangat baik
5	Handayani	84,22	100	Sangat baik
6	Pamekar	98,54	100	Sangat baik
7	Usaha Sejahtera	72,72	75	baik
8	Kuncoro	96,59	100	Sangat baik
9	Keluarga 2	95,50	100	Sangat baik
10	Bahagia	75,13	75	Baik
Total		912,92		
Mean/ Rata-rata		91,30	100	Sangat baik

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 pelunasan simpanan wajib pada KPRI Hebad sebesar 91,20% hal ini menunjukkan bahwa pelunasan simpanan wajib koperasi sangat baik, KPRI Ngudi Santoso sebesar 99,22% hal ini menunjukkan Koperasi

sangat baik. Sedangkan KPRI Mizan sebesar 99,80% menunjukkan kriteria koperasi sangat baik, KPRI Keluarga 1 pelunasan simpanan wajib sebesar 100% hal tersebut menunjukkan koperasi sangat baik dan KPRI Handayani 84,22% menunjukkan koperasi sangat baik. KPRI Pamekar pelunasan simpanan wajib sebesar 98,54% hal tersebut berarti kriteria koperasi sangat baik, KPRI Usaha Sejahtera sebesar 72,72% menunjukkan kriteria koperasi baik. KPRI Kuncoro perhitungan pelunasan simpanan wajib sebesar 96,59% menunjukkan koperasi sangat baik, KPRI Keluarga 2 sebesar 95,50% hal ini berarti kriteria koperasi sangat baik dan KPRI Bahagia pelunasan simpanan wajib sebesar 75,13% hal ini berarti bahwa kriteria koperasi baik. Mean atau rata-rata perhitungan pelunasan simpanan wajib dari sepuluh KPRI di Kabupaten Rembang sebesar 91,30% hal ini menunjukkan bahwa pelunasan simpanan wajib dari sepuluh KPRI di Kabupaten Rembang dalam kriteria sangat baik.

**Tabel 4.7 Pelunasan Simpanan wajib**

<b>Kriteria</b>	<b>F</b>	<b>%</b>	<b>Skor</b>	<b>Kategori</b>
82% - 100%	8	80	100	Sangat Baik
63% - 81%	2	20	75	Baik
44% - 62%	0	0	0	Cukup Baik
≤ 43%	0	0	0	Kurang Baik
Jumlah	10	100		

sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh hasil 80% atau delapan KPRI termasuk dalam kategori tingkat pelunasan simpanan wajib sangat baik yaitu terletak diantara 82% - 100%. 20% atau dua KPRI mempunyai tingkat pelunasan

simpanan wajib antara 63% - 81% dengan kategori baik. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja KPRI Kabupaten Rembang bila dilihat dari segi pelunasan simpanan wajib sangat baik sebesar 91,30% terletak diantara 82% - 100% dengan nilai 100.

### 3. Transaksi anggota terhadap koperasi

Penilaian terhadap transaksi anggota terhadap koperasi dapat dilihat dari perbandingan antara transaksi yang dilakukan anggota kepada koperasi terhadap total transaksi koperasi. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8 Transaksi Anggota Terhadap Koperasi**

No	Nama KPRI	PEA %	Nilai	Kriteria
1	Hebad	100	100	Sangat baik
2	Ngudi Santosa	72,78	75	Baik
3	Mizan	100	100	Sangat baik
4	Keluarga 1	99,88	100	Sangat baik
5	Handayani	100	100	Sangat Baik
6	Pamekar	100	100	Sangat baik
7	Usaha Sejahtera	100	100	Sangat baik
8	Kuncoro	100	100	Sangat baik
9	Keluarga 2	100	100	Sangat baik
10	Bahagia	100	100	Sangat Baik
Total		972,66		
Mean/ Rata-rata		97,27		Sangat baik

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.8 transaksi usaha anggota pada KPRI Hebad sebesar 100% hal ini menunjukkan bahwa transaksi usaha anggota koperasi sangat baik, KPRI Ngudi Santoso sebesar 72,78% hal ini menunjukkan kategori KPRI baik.

Sedangkan KPRI Mizan sebesar 100% menunjukkan kategori KPRI sangat baik, KPRI Keluarga 1 transaksi usaha anggota sebesar 99,88% hal tersebut menunjukkan kategori KPRI sangat baik, sedangkan KPRI Handayani 100% menunjukkan KPRI sangat baik. KPRI Pamekar memiliki nilai transaksi usaha anggota sebesar 100% hal tersebut berarti kriteria KPRI sangat baik, KPRI Usaha Sejahtera sebesar 100% menunjukkan kategori KPRI sangat baik. KPRI Kuncoro transaksi usaha anggota sebesar 100% menunjukkan KPRI dikategori sangat baik, KPRI Keluarga 2 sebesar 100% hal ini berarti kriteria KPRI sangat baik dan KPRI Bahagia memiliki transaksi usaha anggota sebesar 100% hal ini berarti bahwa kriteria KPRI sangat baik.

Mean atau rata-rata perhitungan transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota dari sepuluh KPRI di Kabupaten Rembang sebesar 97,27% hal ini menunjukkan bahwa KPRI di Kabupaten Rembang dalam kriteria sangat baik.

**Tabel 4.9 Transaksi Anggota Terhadap Koperasi**

<b>Kriteria</b>	<b>F</b>	<b>%</b>	<b>Skor</b>	<b>Kategori</b>
82% - 100%	9	90	100	Sangat Baik
63% - 81%	1	10	75	Baik
44% - 62%	0	0	0	Cukup Baik
≤ 43%	0	0	0	Kurang Baik
Jumlah	10	100		

sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh hasil 90% atau sembilan KPRI memiliki transaksi anggota terhadap koperasi dalam kategori sangat baik yaitu terletak diantara 82% - 100%. 10% atau satu KPRI memiliki transaksi usaha koperasi



dengan usaha anggota dalam kategori baik yaitu terletak antara 63% - 81%. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja KPRI Kabupaten Rembang bila dilihat dari segi transaksi anggota terhadap koperasi berada pada angka 97,27% yang terletak antara angka 82% - 100%. Dengan demikian transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota dalam kategori sangat baik.

#### 4. Penagihan piutang

Penilaian terhadap Penagihan piutang dapat dilihat dari kemampuan koperasi dalam menagih piutang. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.10 Penagihan piutang**

No	Nama KPRI	PEA (hari)	Skor	Kriteria
1	Hebad	214	0	Kurang baik
2	Ngudi Santosa	228	0	Kurang baik
3	Mizan	269	0	Kurang baik
4	Keluarga 1	174	0	Kurang baik
5	Handayani	207	0	Kurang baik
6	Pamekar	227	0	Kurang baik
7	Usaha Sejahtera	131	0	Kurang baik
8	Kuncoro	293	0	Kurang baik
9	Keluarga 2	129	0	Kurang baik
10	Bahagia	209	0	Kurang baik
Total		2081		
Mean/ rata-rata		208	0	Kurang baik

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.10 penagihan piutang pada KPRI Hebad sebesar 214 hari hal ini menunjukkan bahwa penagihan piutang koperasi kurang baik,

KPRI Ngudi Santoso sebesar 228 hari hal ini menunjukkan KPRI memiliki kategori kurang baik. Sedangkan KPRI Mizan memiliki penagihan piutang sebesar 269 hari hal ini menunjukkan kategori KPRI kurang baik, KPRI Keluarga 1 sebesar 174 hari hal ini menunjukkan KPRI kurang baik. KPRI Handayani memiliki penagihan piutang sebesar 207 hari menunjukkan KPRI kurang baik, KPRI Pamekar sebesar 227 hari hal ini berarti kategori KPRI kurang baik, KPRI Usaha Sejahtera sebesar 131 hari menunjukkan kategori KPRI baik. KPRI Kuncoro memiliki penagihan piutang sebesar 293 hari hal ini menunjukkan KPRI kurang baik, KPRI Keluarga 2 sebesar 129 hari hal ini berarti kategori KPRI kurang baik. KPRI Bahagia memiliki penagihan piutang sebesar 209 hari hal ini berarti bahwa kategori KPRI kurang baik.

Mean atau rata-rata perhitungan penagihan piutang sepuluh KPRI di Kabupaten Rembang sebesar 208 hari hal ini menunjukkan bahwa penagihan piutang sepuluh KPRI di Kabupaten Rembang dalam kategori kurang baik.

**Tabel 4.8 Penagihan piutang**

Kriteria	F	%	Skor	Kategori
≤ 43 hari	0	0	0	Sangat Baik
44 hari – 62 hari	0	0	0	Baik
63 hari – 81 hari	0	0	0	Cukup Baik
82 hari – 100 hari	10	100	0	Kurang Baik
Jumlah	10	100		

sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.11 diperoleh hasil 100% atau sepuluh KPRI memiliki penagihan piutang kurang baik yaitu lebih dari 100 hari. Dari hasil penelitian

tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja KPRI Kabupaten Rembang bila dilihat dari segi penagihan piutang berada pada angka 208 hari yang terletak pada angka lebih dari 100 hari. Artinya kemampuan KPRI dalam penagihan piutang masih sangat rendah, perlu adanya keaktifan dari pengurus dan kesadaran anggota untuk berpartisipasi dalam mengembalikan pinjaman.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pengukuran Kinerja dengan Rentabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas (RLS)**

Pengukuran kinerja RLS digunakan untuk mengetahui seberapa besar kinerja KPRI bila dihitung rentabilitas, solvabilitas dan rentabilitasnya. adapun penjelasan secara detail sebagai berikut:

#### **1. Rentabilitas**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rentabilitas modal sendiri KPRI se Kabupaten Rembang pada tahun 2010 memiliki rata-rata sebesar 9,89%. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum efisiensi manajemen dalam pemanfaatan modal sendiri pada KPRI se Kabupaten Rembang untuk menghasilkan laba atau SHU. Selain itu KPRI juga belum optimal dalam menggunakan modal yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. modal sendiri sangat dipengaruhi oleh peran anggota dalam membayar iuran, cadangan dan hibah. maka partisipasi dalam memupuk modal sendiri melalui simpanan mereka sangat dibutuhkan KPRI di Kabupaten Rembang.

## **2. Likuiditas**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Likuiditas KPRI se Kabupaten Rembang pada tahun 2010 memiliki rata-rata sebesar 451,46%. Hal ini berarti setiap Rp.1 hutang lancar dapat dijamin dengan Rp.4,5146 aktiva lancar. Keadaan ini nampaknya menguntungkan bagi kreditur karena pinjaman jangka pendek diberi jaminan 4,5146 kali lipat dengan aktiva lancar, dengan demikian keadaan keuangan koperasi dalam keadaan likuid. Dengan demikian kemampuan koperasi untuk membayar hutang jangka pendek sangat besar karena dapat dengan cepat dipenuhi dengan aktiva.

## **3. Solvabilitas**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Likuiditas KPRI se Kabupaten Rembang pada tahun 2010 memiliki rata-rata sebesar 275,34%. Hal ini berarti jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan sedikit. Dengan kata lain, lebih mengutamakan penggunaan modal sendiri daripada modal pinjaman untuk membiayai aktiva pada koperasi. Kondisi keuangan jangka pendek yang baik tidak menjamin adanya kondisi keuangan yang baik pula dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu manajemen keuangan yang baik agar kondisi keuangan jangka pendek dapat memberikan prediksi baik pula untuk jangka panjang.

### **4.2.2 Pengukuran Kinerja Dengan Partisipasi Ekonomi Anggota**

Pengukuran kinerja dengan Partisipasi Ekonomi Anggota, dibagi menjadi dua karena dalam badan usaha koperasi anggota selain sebagai pemilik (*owner*) juga sebagai pengguna (*user*). Anggota sebagai pemilik (*owner*) dibuktikan

dengan membayar dan melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib dan simpanan sukarela, sedangkan anggota sebagai pengguna (*user*) dibuktikan dengan melakukan transaksi terhadap koperasi dan membayar piutang. focus penelitian ini untuk partisipasi anggota sebagai pemilik (*owner*) adalah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib, sedangkan partisipais anggota sebagai pengguna (*user*) adalah melakukan transaksi dan membayar piutang. Berikut pembahasannya:

Partisipasi anggota terdiri dari beberapa jenis, baik partisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi (transaksi jual/ beli atau simpan pinjam dengan koperasi), partisipasi dalam pemupukan modal (kesadaran anggota dalam memenuhi kewajiban-kewajibanya, yaitu membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela), partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengikuti rapat, partisipasi pengawasan (Herdiana: 2009). Partisipasi ekonomi anggota dalam hal ini adalah keterlibatan anggota dalam kegiatan ekonomi koperasi dan pemupukan modal. Partisipasi ekonomi anggota dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja koperasi.

Dalam penelitian kinerja KPRI Kabupaten Rembang pada partisipasi ekonomi anggota belum dapat dikatakan maksimal karena ada elemen yang masih kurang baik, yakni pada keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota dan penagihan piutang . Padahal keberhasilan koperasi salah satunya ditentukan oleh partisipasi anggota.

Pada penelitian ini, kinerja koperasi dilihat dari partisipasi pada pemupukan modal berupa pelunasan simpanan pokok dan simpanan wajib serta

partisipasi dalam kegiatan ekonomi koperasi berupa keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota, melakukan transaksi pada koperasi serta penagihan piutang. Hal ini berarti partisipasi anggota dilandaskan pada prinsip identitas gandanya (*dual identity*), yaitu anggota sebagai pemilik, sekaligus sebagai pengguna. Sebagai pemilik, anggota wajib berpartisipasi dalam penyertaan modal, pengawasan dan membuat keputusan; sedangkan sebagai pengguna/pelanggan, anggota koperasi wajib memanfaatkan fasilitas, layanan, barang, maupun jasa yang disediakan oleh koperasi.

Partisipasi anggota sangat penting karena adanya ketergantungan antara anggota dengan koperasi dan sebaliknya yang akan berpengaruh pada perkembangan usaha koperasi. Semakin kuat ketergantungan anggota dengan perusahaan koperasi, maka semakin tinggi dan baik perkembangan organisasi dan usaha koperasi, sehingga koperasi merasakan manfaat keberadaan koperasi dan koperasi semakin sehat berkembang sebagai badan usaha atas dukungan anggota secara penuh. Koperasi memberikan manfaat (*cooperative effect*) secara ekonomi langsung maupun tidak langsung bagi anggota, dan anggota mendukung, berinteraksi, dan proaktif bagi perkembangan usaha koperasi. Mengingat pentingnya partisipasi anggota salah satunya dalam hal ekonomi diharapkan KPRI mampu meningkatkan kinerja dalam hal partisipasi ekonomi anggota demi kelangsungan usaha koperasi dan sebagai indikator KPRI yang mempunyai kinerja baik.

Dibawah ini pembahasan dari masing-masing indikator pada variabel partisipasi ekonomi anggota.

## **1. Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik (*Owner*)**

### **Pelunasan Simpanan Pokok**

Pelunasan simpanan pokok di KPRI se Kabupaten Rembang secara keseluruhan pada tahun 2010 sebesar 99,30%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase pelunasan simpanan pokok anggota yang diterima koperasi sesuai dengan AD/ART KPRI se Kabupaten Rembang sudah sangat baik, karena jumlah simpanan pokok yang telah dibayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan jumlah simpanan pokok yang sebenarnya harus dilunasi.

Simpanan pokok merupakan modal utama yang berasal dari anggota koperasi dan akan digunakan untuk kepentingan operasional usaha koperasi. Secara keseluruhan kondisi KPRI se Kabupaten Rembang termasuk dalam kategori sangat baik pada tahun 2010 pada sisi pelunasan simpanan pokok jika diukur dengan parameter. Dari standar penentuan kinerja koperasi komponen pelunasan simpanan pokok berpredikat sangat baik terletak dikisaran 82% - 100%. Hal ini berarti kemampuan KPRI se Kabupaten Rembang dalam menghimpun dana sebagai modal sangat baik mengingat simpanan pokok sebagai salah satu sumber modal sendiri serta modal dasar KPRI. Jumlah modal sendiri dapat dijadikan indikator kemandirian koperasi. Semakin baik modal sendiri berarti kemandirian koperasi semakin tinggi.

Hasil analisis tersebut juga memperlihatkan bahwa anggota KPRI se Kabupaten Rembang berpartisipasi aktif dalam pelunasan simpanan pokok yang akan memperlancar kegiatan koperasi. Dengan modal yang semakin

besar, maka semakin besar pula peluang koperasi untuk memperluas jangkauan usahanya sehingga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan atau memperbesar volume usaha dan akan menaikkan laba. Hal ini sesuai dengan pendapat Gito Sudarmo dan Basri (2000: 37) bahwa dengan modal usaha yang lebih dari cukup diharapkan dapat mengurangi resiko dan dapat menaikkan penghasilan atau laba.

### **Pelunasan Simpanan Wajib**

Pelunasan simpanan wajib di KPRI se Kabupaten Rembang secara keseluruhan pada tahun 2010 sebesar 91,30%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase pelunasan simpanan wajib anggota yang diterima koperasi sesuai dengan AD/ART KPRI se Kabupaten Rembang sudah sangat baik, karena jumlah simpanan wajib yang telah dibayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan jumlah simpanan wajib yang sebenarnya harus dilunasi.

Simpanan wajib merupakan modal utama selain simpanan pokok yang berasal dari anggota koperasi dan akan digunakan untuk kepentingan operasional usaha koperasi. Pelunasan simpanan wajib termasuk dalam kategori sangat baik dikarenakan keseluruhan anggota KPRI se Kabupaten Rembang adalah pegawai negeri dan pembayarannya melalui pemotongan gaji perbulan oleh pengurus. Meskipun demikian, adapula KPRI yang belum mencapai kinerja maksimal dalam pelunasan simpanan wajib karena kondisi dari anggota.



Secara keseluruhan kondisi KPRI se Kabupaten Rembang termasuk dalam kategori sangat baik pada tahun 2010 pada sisi pelunasan simpanan wajib jika diukur dengan parameter. Dari standar penentuan kinerja koperasi komponen pelunasan simpanan wajib yang berpredikat sangat baik terletak dikisaran 82% - 100%. Hal ini berarti kemampuan KPRI se Kabupaten Rembang dalam menghimpun dana sebagai modal sangat baik mengingat simpanan wajib sebagai sumber modal sendiri dan modal dasar KPRI selain simpanan pokok. Jumlah modal sendiri dapat dijadikan indikator kemandirian koperasi. Semakin baik modal sendiri berarti kemandirian koperasi semakin tinggi.

Hasil analisis tersebut juga memperlihatkan bahwa anggota KPRI se Kabupaten Rembang berpartisipasi aktif dalam pelunasan simpanan wajib yang akan memperlancar kegiatan koperasi. Dengan modal yang semakin besar, maka semakin besar pula peluang koperasi untuk memperluas jangkauan usahanya sehingga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan atau memperbesar volume usahanya dan akan menaikkan laba. Hal ini sesuai dengan pendapat Gito Sudarmo dan Basri (2000: 37) bahwa dengan modal usaha yang lebih dari cukup diharapkan dapat mengurangi resiko dan dapat menaikkan penghasilan atau laba.

## **2. Partisipasi Anggota Sebagai Pengguna (*User*)**

### **Transaksi anggota terhadap usaha koperasi**

Transaksi anggota terhadap koperasi di KPRI se-Kabupaten Rembang secara keseluruhan pada tahun 2010 sebesar 97,27%. Jadi pada tahun 2010

KPRI Kabupaten Rembang mempunyai tingkat transaksi anggota terhadap koperasi sangat baik. Dari hasil perhitungan deskriptif persentase menunjukkan bahwa sebagian besar KPRI memiliki skor transaksi anggota terhadap koperasi sangat baik yang ditunjukkan dengan nilai sebesar 90% atau sembilan KPRI dalam kriteria sangat baik, hal ini berarti partisipasi anggota dalam melakukan transaksi kepada koperasi sangat baik. Hampir sebagian besar transaksi koperasi berasal dari anggota.

Hal ini perlu di pertahankan dan ditingkatkan mengingat tujuan utama koperasi mensejahterakan anggota. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota koperasi secara menyeluruh menyatu dengan kegiatan koperasi. Koperasi akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan anggotanya karena koperasi merupakan usaha untuk mensejahterakan anggotanya.

### **Penagihan piutang**

Penagihan piutang di KPRI se Kabupaten Rembang rata-rata pada tahun 2010 sebesar 208 hari. Jadi pada tahun 2010 KPRI Kabupaten Rembang mempunyai tingkat penagihan piutang yang kurang baik. Dari hasil perhitungan deskriptif persentase menunjukkan bahwa sebesar 100% atau sepuluh KPRI memiliki kemampuan penagihan piutangnya lebih dari 100 hari. Hal ini karena adanya piutang macet atau anggota tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Dapat pula disebabkan oleh banyaknya penjualan yang dilakukan dengan piutang sehingga piutang akan semakin tinggi dan semakin besar pula resiko tidak tertagih. Jika kondisi diteruskan maka dikhawatirkan akan banyak menimbulkan kredit macet yang

dapat berdampak pada kerugian koperasi itu sendiri. Dengan keadaan yang demikian perlu dilakukan pengendalian terhadap piutang dan kredit selektif.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka simpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Kinerja KPRI Kabupaten Rembang memiliki rata-rata rasio rentabilitas sebesar 9,89%, rata-rata rasio likuiditas sebesar 451,46% dan rasio solvabilitas sebesar 275,34%.
2. Partisipasi anggota sebagai pemilik (*owner*) yakni Pelunasan simpanan pokok pada KPRI di Kabupaten Rembang tahun buku 2010 rata-rata sebesar 99,30% termasuk kategori sangat baik dan pelunasan simpanan wajib pada KPRI di Kabupaten Rembang tahun buku 2010 rata-rata sebesar 91,30% termasuk kategori sangat baik.
3. Partisipasi anggota sebagai pengguna (*user*) yakni transaksi anggota terhadap koperasi pada KPRI di Kabupaten Rembang tahun buku 2010 rata-rata sebesar 97,27% termasuk kategori sangat baik dan penagihan piutang pada KPRI di Kabupaten Rembang tahun buku 2010 rata-rata sebesar 208 hari termasuk kategori kurang baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

### 1. Bagi KPRI

- a. Peningkatan partisipasi ekonomi dengan jalan pemberian jangka waktu penagihan piutang dan pengendalian piutang. Apabila ada anggota yang tidak membayar tepat waktu maka dikenakan sanksi baginya.
- b. Mendorong anggota berpartisipasi aktif untuk meningkatkan kemampuan, pelayanan agar kinerja partisipasi ekonomi dapat maksimum dan dapat meningkatkan usaha dimasa mendatang.
- c. Diharapkan KPRI melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui dan mengevaluasi kerja KPRI guna kepentingan di masa depan yang lebih baik.

### 2. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan melakukan penelitian yang lebih mendetail terutama terhadap indikator-indikator yang masih kurang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moh. 1994. *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi*. Bandung: Angkasa
- Amin Widjaya Tunggal. 1994. *Akuntansi Untuk Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anoraga, Panji dan Ninik Widiyanti, 2003. *Dinamika Koperasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Atkinson, Antony. A. Et. Al. 1995. *Management Accounting Prentice Hall*: New Jersey.
- Baswir, Revrison. 1997. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta : BPFE.
- Chaniago, Arifinal. 1984. *Koperasi Unit Desa*. Bandung: Angkasa.
- Dinas Koperasi dan UKM. 2004. *Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Dan Usaha Koperasi*. Jakarta : Dinas Koperasi Dan UKM
- Gito Sudarmo, Basri. 2003. *Manajemen Keuangan* . Yogyakarta: BPFE
- Hadiwijaya. 2001. *Modal Koperasi*. Bandung: CV Pronir Jaya.
- Hansen and Mowen. 1995. *Cost Management Accounting and Control*. Jakarta : Gramedia Pustaka
- Hasnawati. 2004. "Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Samudera Sejahtera Samarinda". Samarinda.
- Hendar dan Kusnadi. 1999. *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ikhsan, Sukardi. 2005. *Pengukuran Kinerja Koperasi*. Semarang. Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia Koperasi GKPRI Jawa Tengah.
- Kaplan & Norton. 2000. *Balanced Scorecard Menerapkan Strategi Menjadi Aksi*. Jakarta: Erlangga
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 2001. *Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam*. Jakarta : Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.

- Kep. Men Koperasi dan UKM No. 129/KEP/M/KUKMI/XI/2002. dan PP No.9 Th 1965. Kep. Men No. 226-227 Th 1996. Kantor Dinas Koperasi dan UKM.
- Manjaya, Manu. 2010. “ Kinerja Keuangan Koperasi Aspek Otonomi dan Kemandirian”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.
- Mayasari, Nurul Eka.2008. “Analisi kinerja dan persepsi pengurus terhadap Koperasi Primer anggota PKPRI Kabupaten Blora tahun 2005-2006”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Munawir. 2002. *Analisa Laporan Keuangan Edisi Keempat*. Yogyakarta: Liberty.
- Parmanto, Ridho.2007. “Pengaruh Efisiensi Usaha, Efisiensi Anggota dan Partisipasi Ekonomi Anggota terhadap Kelengkapan Pengungkapan Wajib Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Kudus”.*Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.
- Prihastuti, Anita. 2007. “Analisis kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) anggota PKPRI Kota Magelang Tahun 2004-2005”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.
- Riani,eli dewi. 2007. “Kinerja Koperasi Berdasarkan Kep.Men.No. 129/KEP/MUKMMI/XI/2002, hambatan, permasalahan, dan implementasinya (Studi kasus pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia se-Kabupaten Pemalang)” *Skripsi*.semarang: Fakultas UNNES.
- Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE
- Ropke, Jochen, 1995. *Kewirausahaan Koperasi – Dinamika Kewirausahaan dan pengembangan Dalam Organisasi Swadaya*, , Bandung: UPT Penerbitan IKOPIN
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Sudarsono dan Edilius. 2002. *Koperasi dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudjana. 1996. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito
- Sugiyanto, 2002. *Promosi Ekonomi Anggota (PEA) Sebagai Ukuran Kinerja Keuangan Koperasi*. Dalam Jajang. W.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. 2003. Semarang: Aneka Ilmu.

Widiyanti, Ninik dan Sunindhia. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zulfanetti, 2006. "Analisis Hubungan Partisipasi Anggota Dengan Keberhasilan Koperasi Unit Desa (KUD) di Kecamatan Sungai Bahar". Jambi: Universitas Jambi.





# LAMPIRAN - LAMPIRAN



### DAFTAR SAMPEL KPRI KABUPATEN REMBANG

<b>NO</b>	<b>Nama KPRI</b>	<b>Badan Hukum</b>
1.	Hebad	5562.c/BH/PAD/KWK.11/VI/1996
2.	Ngudi Santoso	9235.c/BH/PAD/KWK.11/IX/2001
3.	Mizan	10853.a/BH/PAD/KWK.11/III/1997
4.	Keluarga 1	10592.b/BH/PAD/KWK.11/X/1996
5.	Handayani	2293.b/BH/PAD/KWK.11/III/1996
6.	Pamekar	5561.c/BH/PAD/KWK.11/X/1996
7.	Usaha Sejahtera	10191.a/BH/PAD/KWK.11/XI/1996
8.	Kuncoro	10896.a/BH/PAD/KWK.11/IX/1995
9.	Keluarga 2	9394.c/BH/PAD/518-27/IX/2003
10.	Bahagia	10816.a/BH/PAD/KWK.11/VI/1996



**DATA PERHITUNGAN PARTISIPASI EKONOMI ANGGOTA KPRI  
KABUPATEN REMBANG**

**1. Pelunasan Simpanan Pokok**

No	Nama KPRI	2010		Partisipasi Ekonomi anggota (PEA) %	Kriteria
		Simpok Telah Dibayar (Rp)	Simpok yang Harus Lunas (Rp)		
1	Hebad	9.120.000	9.120.000	100	Sangat baik
2	Ngudi Santosa	5.700.000	5.700.000	100	Sangat baik
3	Mizan	930.000	930.000	100	Sangat baik
4	Keluarga 1	3.525.000	3.525.000	100	Sangat baik
5	Handayani	45.150.000	46.500.000	97,10	Sangat baik
6	Pamekar	27.875.000	27.900.000	99,91	Sangat baik
7	Usaha Sejahtera	7.725.000	7.725.000	100	Sangat baik
8	Kuncoro	550.000	550.000	100	Sangat baik
9	Keluarga 2	4.300.000	4.300.000	100	Sangat baik
10	Bahagia	2.015.000	2.100.000	95,95	Sangat Baik
<b>Rata-rata</b>				<b>99,30</b>	<b>Sangat baik</b>

**2. Pelunasan Simpanan Wajib**

No	Nama	2010		PEA %	Kriteria
		Simwa Telah Dibayar (Rp)	Simwa yang Harus Lunas (Rp)		
1	Hebad	62.384.000	68.400.000	91,20	Sangat baik
2	Ngudi Santosa	33.934.800	34.200.000	99,22	Sangat baik
3	Mizan	14.850.000	14.880.000	99,80	Sangat baik
4	Keluarga 1	16.920.000	16.920.000	100	Sangat baik
5	Handayani	234.976.200	279.000.000	84,22	Sangat baik
6	Pamekar	174.816.000	177.400.000	98,54	Sangat baik
7	Usaha Sejahtera	35.953.500	49.440.000	72,72	Baik
8	Kuncoro	5.100.000	5.280.000	96,59	Sangat baik
9	Keluarga 2	19.711.700	20.640.000	95,50	Sangat baik
10	Bahagia	14.200.420	18.900.000	75,13	Baik
<b>Rata-rata</b>				<b>91,30</b>	<b>Sangat baik</b>

### 3. Transaksi Anggota Terhadap Usaha Koperasi

No.	Nama KPRI	2010		PEA %	Kriteria
		Transaksi Anggota (Rp)	Transaksi Seluruhnya(Rp)		
1	Hebad	3.141.052.210	3.141.052.210	100	Sangat baik
2	Ngudi Santosa	539.607.515	690.410.140	72,78	Baik
3	Mizan	180.500.000	180.500.000	100	Sangat baik
4	Keluarga 1	361.762.500	362.187.500	99,88	Sangat baik
5	Handayani	3.429.467.433	3.429.467.433	100	Sangat baik
6	Pamekar	2.456.514.745	2.456.514.745	100	Sangat baik
7	Usaha Sejahtera	2.649.112.500	2.649.112.500	100	Sangat Baik
8	Kuncoro	71.335.000	71.335.000	100	Sangat baik
9	Keluarga 2	862.600.000	862.600.000	100	Sangat baik
10	Bahagia	191.095.000	191.095.000	100	Sangat baik
<b>Rata - rata</b>				<b>97,27</b>	<b>Sangat baik</b>

### 4. Penagihan Piutang Anggota

No	Nama KPRI	2010			Kriteria
		Piutang Tahun Ini (Rp)	Penjualan Kredit	PEA (Hari)	
1	Hebad	1.868.601.590	3.141.052.210		Kurang baik
2	Ngudi Santosa	437.195.625	690.410.140	169,24	Kurang baik
3	Mizan	135.103.707	180.500.000	196,84	Kurang baik
4	Keluarga 1	175.507.750	362.187.500	209,74	Kurang baik
5	Handayani	1.974.955.970	3.429.467.433	122,37	Kurang baik
6	Pamekar	1.548.394.715	2.456.514.745	159,62	Kurang baik
7	Usaha Sejahtera	965.243.700	2.649.112.500	168,68	Kurang baik
8	Kuncoro	58.120.850	71.335.000	103,5	Kurang baik
9	Keluarga 2	308.650.000	862.600.000	223,59	Kurang baik
10	Bahagia	110.929.763	191.095.000	102,57	Kurang baik
<b>Rata - rata</b>				<b>163,67</b>	<b>Kurang baik</b>

**DATA PERHITUNGAN RENTABILITAS KPRI KABUPATEN  
REMBANG**

**1. Rentabilitas**

<b>Nama KPRI</b>	<b>SHU bersih</b>	<b>Modal sendiri</b>	<b>Rentabilitas %</b>
Hebad	Rp 43.063.461,00	Rp901.158.202,00	4,78
Ngudi Santoso	Rp10.983.900,00	Rp439.009.701,20	2,50
Mizan	Rp16.605.284,00	Rp73.640.801,00	22,55
Keluarga 1	Rp19.060.512,33	Rp104.717.467,36	18,20
Handayani	Rp164.084.003,00	Rp894.546.186,00	18,34
Pamekar	Rp48.884.815,00	Rp946.630.797,00	5,16
Usaha Sejahtera	Rp45.767.150,00	Rp421.888.379,85	10,85
Kuncoro	Rp4.343.950,00	Rp93.137.941,00	4,66
Keluarga 2	Rp14.806.325,00	Rp189.366.370,00	7,82
Bahagia	Rp4.200.000,00	Rp104.950.725,00	4,00
<b>Ra-rata</b>			<b>9.89</b>

**2. Likuiditas**

<b>Nama KPRI</b>	<b>Aktiva lancar</b>	<b>Pasiva lancar</b>	<b>Likuiditas %</b>
Hebad	Rp2.024.691.692,00	Rp172582,143.00	1173.18
Ngudi Santoso	Rp444.347.423,20	Rp84313,649.00	527.02
Mizan	Rp154.708.703,00	Rp65341,598.00	236.77
Keluarga 1	Rp176.032.852,04	Rp55962,867.22	314.55
Handayani	Rp2.035.215.007,00	Rp811796,742.00	250.70
Pamekar	Rp1.755.623.273,00	Rp826938,187.00	212.30
Usaha Sejahtera	Rp1.195.918.033,00	Rp139472,434.15	857.46
Kuncoro	Rp59.357.356,00	Rp12901,663.00	460.08
Keluarga 2	Rp312.362.421,00	Rp116635,991.00	267.81
Bahagia	Rp161.772.445,00	Rp75.322.910,00	214.77
<b>Rata - rata</b>			<b>451.46</b>

### 3. Solvabilitas

<b>Nama KPRI</b>	<b>Total aktiva</b>	<b>Total kewajiban</b>	<b>Solvabilitas %</b>
Hebad	2239576,244.00	1295354,581.00	172.90
Ngudi Santoso	581060,157.20	131066,556.00	443.33
Mizan	161587,683.00	71341,598.00	226.50
Keluarga 1	179740,846.93	55962,867.22	321.18
Handayani	2134955,814.00	986325,625.00	216.46
Pamekar	1903435,097.00	943919,485.00	201.65
Usaha Sejahtera	1296628,864.00	828973,334.10	156.41
Kuncoro	63861,840.00	12901,663.00	494.99
Keluarga 2	320808,686.00	116635,991.00	275.05
Bahagia	184473,635.00	75322,910.00	244.91
<b>Rata - rata</b>			275.34



## **INSTRUMEN PENELITIAN**

### **Pedoman Dokumentasi**

**ANALISIS KINERJA KOPERASI ASPEK PARTISIPASI EKONOMI  
ANGGOTA PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)  
KABUPATEN REMBANG**

Nama Koperasi :

Alamat :

Badan Hukum :

### **PARTISIPASI EKONOMI ANGGOTA**

1. Pelunasan Simpanan Pokok Anggota
  - a. Berapa jumlah anggota yang dimiliki KPRI pada tahun 2010?
  - b. Berapa besarnya simpanan pokok anggota?
  - c. Berapa simpanan pokok yang telah dibayar oleh anggota pada tutup buku tahun 2010?
2. Pelunasan Simpanan Wajib Anggota
  - a. Berapa besarnya simpanan wajib anggota di KPRI pada tahun 2010?
  - b. Berapa jumlah simpanan wajib yang telah dibayar anggota pada tutup buku tahun 2010?
3. Transaksi anggota terhadap usaha koperasi
  - a. Berapa total transaksi dari masing-masing unit usaha KPRI?
  - b. Apakah transaksi hanya dilakukan oleh anggota KPRI saja?
  - c. Berapa transaksi yang dilakukan oleh anggota terhadap masing-masing unit usaha KPRI?
  - d. Berapa total transaksi yang dilakukan non anggota terhadap masing-masing unit usaha KPRI?
4. Pengembalian Piutang
  - a. Piutang apa saja yang dimiliki oleh KPRI pada tahun buku 2010?
  - b. Berapa jumlah masing-masing piutang KPRI?
  - c. Berapa saldo masing-masing piutang KPRI pada tahun buku 2010?
  - d. Berapa saldo masing-masing piutang KPRI pada tahun buku 2009?

- e. Penjualan kredit apa saja yang dimiliki oleh KPRI?
- f. Berapa jumlah masing-masing penjualan kredit KPRI?

